



VOLUME XI / NO. 104 / MEI 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

PKN STAN PENCETAK GENERASI ANDAL

STAN dikenal sebagai kampus plat merah bergengsi. Ribuan alumninya dengan penuh dedikasi mengabdikan diri di berbagai penjurusan negeri dan institusi. Kini, STAN bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara. Menjanjikan level pendidikan yang lebih tinggi.



Daftar Isi



Foto Cover
Tino A.P.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

13 Kampus Penghasil Alumni Mumpuni

16 Infografis

18 Penjaga Pintu Pertama

21 Menyambut Kemenkeu Corporate University

23 PKN STAN Siap Menjawab Tantangan

REPORTASE

25 Penadatanan Nota Kesepahaman Pendalaman Pasar Keuangan

26 Apresiasi dan Penghargaan pada 24 Wajib Pajak Besar

WAWANCARA

27 Geliat Ekonomi Banyuwangi

POTRET KANTOR

30 Melayani dengan SEHATI

FIGUR

32 Tekad Terbaik

EKONOMI TERKINI

36 Perbaiki Regulasi dan Iklim Investasi

KOLOM EKONOM

40 Gini Ratio dan Neraca Perdagangan Catat Hasil Baik

GENERASI EMAS

44 Cerita Staf Khusus Menteri Termuda

OPINI

46 Kenaikan PTKP Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

REGULASI

48 Optimalikan Capaian Target, DJP Perkuat Basis Data Sekunder

INSPIRASI

50 Menjejak Hingga ke Perut Bumi

RENUNGAN

52 Menjawab Dilema Ibu Bekerja

BUKU

53 Mengawal Reformasi Pembangunan Ekonomi

JALAN-JALAN

54 Satu Hari Seru di Dusun Bambu

SELEBRITI

56 Rumah Kedua Bagi Valerina

57 BUNG PISKAL

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. **Pemimpin Redaksi:** Moh. Firdaus Rumbia. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Sulastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulisty, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Arief Rahman Hakim, Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Noer Anggraini, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Etti Dyah Widiati. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muparrih, Shera Betania, Sulis Gigih Prayogo, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. **Redaktur Foto:** Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. **Desain Grafis dan Layout:** Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.



15 -19 May 2016. Jakarta, Indonesia
IDB GROUP 41st ANNUAL MEETING
 Enhancing Growth and Poverty Alleviation through
 Infrastructure Development and Financial Inclusion

Exhibition. 15 -19 May 2016. JCC, Jakarta, Indonesia

more information

<http://www.kemenkeu.go.id/STIDB2016>

<http://www.isdb-am41.org/>

STAN Bertransformasi

Pendidikan merupakan salah satu wahana pembentuk karakter bangsa. Dengan pendidikan terbaik dan kedisiplinan yang diberikan melalui sekolah, siapapun bisa dididik untuk mendapatkan prestasi terbaik. Seiring dengan derasnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi semakin besar.

Melihat kebutuhan institusi di negeri ini akan lulusan yang mampu bekerja di bidang keuangan negara semakin besar, maka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak tinggal diam. Selain Kemenkeu, ada BPK, BPKP, kementerian/lembaga lain, dan pemerintah daerah yang membutuhkan tenaga di bidang keuangan negara.

Keberadaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di dunia pendidikan nasional memang tak perlu diragukan. Kampus ini telah menghasilkan lulusan andal yang pastinya siap menjawab tantangan. Lulusannya banyak yang sukses, bahkan menjadi pembuat kebijakan. Di antaranya, sebut saja Menteri ESDM Sudirman Said; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi; dan Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito.

Selain itu, STAN didirikan karena tenaga akuntan tidak bisa dicetak hanya dengan sebuah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Atas dasar hal tersebut, STAN pun

didirikan. Dengan mendirikan sekolah tinggi, maka sistem pendidikan yang dibuat juga berbeda dengan pusdiklat. Selanjutnya, setelah berdiri selama 40 tahun, STAN merasa harus menghadirkan pendidikan dengan level yang lebih tinggi. Akhirnya, pada bulan November 2015, STAN resmi bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.

Embrio STAN yang berasal dari pusdiklat ini tidak memiliki dosen sebagai pengajar, melainkan widyaiswara, pejabat, dan pegawai. Pegawai yang mengajar di STAN berasal dari Kementerian Keuangan, BPKP, BPK, dan kantor akuntan publik atau perguruan tinggi yang lainnya. Namun, setelah bertransformasi, PKN STAN harus mempunyai pengajar berstatus dosen.

PKN STAN diharapkan dapat menjadi *leader* wadah pendidikan di bidang keuangan di Indonesia. Boleh dikatakan PKN STAN memiliki *resources* terlengkap, baik dari sisi pengalaman, pengetahuan, sumber daya manusia, sistem, dan sebagainya. Semua lulusan PKN STAN nantinya diharapkan benar-benar menjadi sumber daya manusia yang andal. Selanjutnya, mengikuti visi dan misi Kemenkeu, PKN STAN diharapkan mampu menjadi salah satu perguruan tinggi di bidang keuangan negara yang terbaik di kancah internasional.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Hingga kini, PKN STAN terus diminati oleh para lulusan SMA yang ingin mempelajari keuangan negara. Apakah kamu termasuk yang tertarik? Jika kamu tertarik #KuliahSTAN, yuk, bagikan alasan kamu mendaftar #KuliahSTAN. Para alumni STAN juga boleh berbagi pengalaman #KuliahSTAN

Maisyaroh @woemaai
 saya tertarik #KuliahSTAN karena saya ingin melakukan perubahan terhadap Indonesia untuk menuju Indonesia yang lebih baik

mustofa rizky @mus_abe2

Krn PKN STAN merupakan sekolah tinggi yang sangat Anti KKN dari awal proses pendaftaran-kegiatan perkuliahan yang tidak menoleransi apapun aktifitas / suatu perbuatan KKN (contek menyontek). Sehingga lulusan dari PKN STAN banyak menghasilkan orang2 yang memiliki peran penting dan menghasilkan kebijakan2 strategis. Bismillah jadi mahasiswa STAN 2016 #KuliahSTAN

Offatur™ @fatur_boim

alasan ingin #KuliahSTAN, karena ingin ikut berpartisipasi dalam mewujudkan perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik

tweet



Bangga pada Karya Anak Bangsa

Indonesia berhasil mengekspor gerbong kereta penumpang buatan PT Industri Kereta Api (INKA) ke Bangladesh. Ini adalah pencapaian anak bangsa yang membanggakan. Setelah lama bergantung pada ekspor komoditas mentah, ekspor gerbong kereta diharapkan dapat diikuti dengan hasil manufaktur lainnya. Pelepasan ekspor tahap pertama gerbong kereta INKA dilakukan pada Kamis (31/3) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Foto
Aditya Arifianto

Karena Kerbau Begitu Berharga

Di Toraja, Sulawesi Utara, kerbau merupakan lambang kemakmuran dan diperlakukan dengan istimewa. Berbagai upacara adat senantiasa mensyaratkan kerbau sebagai persembahan utama. Di Pasar Bolu di Poros Rantepao, Palopo, hewan yang dalam bahasa setempat disebut *tedong* itu bisa dijual hingga ratusan juta rupiah per ekor. Pasar Bolu konon adalah pasar kerbau terbesar di dunia. Dalam sehari, sedikitnya terdapat 500 ekor yang diperjualbelikan di pasar itu.

Foto
Eko P.W.





Kemenkeu Raih Penghargaan PRIMAS 2016

25,03

Teks Biro KLI
Foto Biro KLI

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan penghargaan The 1st PR Indonesia Media Relations Award and Summit (PRIMAS) 2016. Kemenkeu menempati peringkat III dalam kategori Kementerian dengan media exposure terbanyak sepanjang tahun 2015. Sebagai informasi penghargaan PRIMAS diberikan kepada 40 kementerian/lembaga/BUMN dan korporasi.

Pemerintah Serahkan LKPP Unaudited Tepat Waktu

30,03

Teks DJPB
Foto DJPB

Menjalankan salah satu tugas utama dan amanat undang-undang, Kementerian Keuangan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis (30/03). LKPP *Unaudited* diserahkan kepada Ketua BPK oleh Menteri Keuangan. Ketua BPK, Harry Azhar Azis dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah karena dapat menyerahkan LKPP TA.2015 tepat waktu.



DJP Berduka

12,04

Teks Biro KLI
Foto DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berduka atas meninggalnya anggota Juru Sita Pajak Negara (JSPN) di KPP Sibolga bernama Parada Toga Fransriano Siahaan dan anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase. Keduanya gugur saat menjalankan tugas, yaitu saat melakukan penagihan pajak kepada salah satu wajib pajak di Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara sebesar Rp14,7 miliar pada Selasa (12/4). Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiateadi pun melayat ke rumah duka di Medan.



Sembilan Kapal Baru Perkuat Armada Bea Cukai

12,04

Teks DJBC
Foto DJBC

Untuk memperkuat armadanya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerima sembilan kapal yang dipesan dari Galangan Nasional PT Daya Radar Utama (PT DRU). Serah terima dilakukan dalam acara *commander trial and ceremony delivery* yang berlangsung di area Galangan Kapal PT DRU di Bandar Lampung, Selasa (12/4). Sembilan kapal baru itu ditujukan untuk memperkuat keseluruhan armada patroli Bea Cukai yang berjumlah 179 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.



Bea Cukai Gagal 14 Ton Ekspor Ilegal Pasir Timah

30,03

Teks DJBC
Foto DJBC

Satu kontainer berisi 14 ton pasir timah yang dilarang diekspor berhasil diamankan petugas Bea Cukai Bandar Lampung. Hal ini terungkap dalam acara konferensi pers yang diadakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bandar Lampung bertempat di area Pelabuhan Panjang Bandar Lampung, Selasa (12/4). Pasir timah atau bijih timah tersebut diperkirakan bernilai Rp2,1 miliar.



Sosialisasi e-Faktur Bagi 3000 PKP di Pontianak

19,04

Teks DJP
Foto DJP

Dalam rangka implementasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur), KPP Pratama Pontianak menggelar pelatihan pembuatan e-faktur kepada semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Pontianak pada Selasa (19/4) di Pontianak Convention Centre (PCC), Pontianak. Sekitar 3000 PKP diundang dalam pelatihan yang terbagi dalam sesi pagi dan sesi siang.



Sukuk Negara Biayai Pembangunan 25 Perguruan Tinggi

13,04

Teks DJPPR
Foto DJPPR

Pada tahun 2016, sebanyak 25 perguruan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama mendapat pembiayaan Sukuk Negara melalui mekanisme Project Financing Sukuk. Ini adalah mekanisme pembiayaan yang dilakukan melalui penerbitan Sukuk Negara khusus untuk proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya yang telah mendapat alokasi (*earmarked*) dalam APBN. Salah satu perguruan tinggi yang mendapat pembiayaan Sukuk Negara adalah IAIN Palangka Raya.



Menkeu Pimpin Development Committee pada IMF-World Bank Spring Meetings

16,04

Teks Biro KLI
Foto Biro KLI

Bertempat di Preston Auditorium, Gedung Bank Dunia, Washington D.C., Amerika Serikat, pada Sabtu (16/04), Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Ketua Development Committee (DC) memimpin persidangan Development Committee, Joint Ministerial Committee of the Boards of Governors of the Bank and The Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries. Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan tujuan dari DC adalah untuk memonitor risiko dan kerusakan yang mungkin terjadi dan mengetahui perkembangan ekonomi terkini dari negara-negara berkembang.

Agenda

21/05 DJP mengadakan operasi katarak gratis, di Kantor Pusat;	02-05/05 ADF Replenishment Meeting and Annual Meeting ADB, di Frankfurt-Germany;	Indonesia Fiscal Policy to Enhance Infrastructure Development and Financial Inclusion for Economic Development, di JCC Jakarta;	di Grand ballroom Hotel Sangrila Jakarta;
29/05 Kampanye Pajak yang diadakan di area CFD Pajak;	17/05 Keynote Speech, dalam rangka Konferensi Internasional Keuangan Syariah dengan topik	24/05 Economic seminar Bank Tokyo-Mitsubishi UFJ-Jakarta Branch,	27/05 SUN Goes to campus, di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Kampus Penghasil Alumni Mumpuni

Masih lekat dalam ingatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi masa-masa menempuh studi di kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Jurangmangu, tempat Heru menuntut ilmu kala itu, masih sangat sepi. “*Angkot*-nya saja *pick up* yang ditutup terpal,” ujarnya. Belum banyak warung makan dan rumah indekos di sana. Tak jarang, para mahasiswa membeli makan di rumah-rumah warga di sekitar kampus. “Kalau malam minggu dan ada hajatan warga, kami nonton film *misbar* (gerimis bubar). Jadi kalau hujan, nonton *bareng*-nya bubar juga,” kata Heru lagi.

Periode menyelesaikan pendidikan D-III pada 1988-1991 menjadi titik penting dalam kehidupan Heru. Mengambil studi kepaebinaan dan cukai, dia melewati setiap waktu dengan gembira bersama teman-teman satu angkatan. Masa belajar di sana dilalui dengan penuh kedisiplinan. “Kami harus ikut tata tertib yang ketat, mulai dari jadwal

kuliah yang super padat sampai cara berpakaian,” ujarnya.

Kedisiplinan juga menjadi kata penghubung yang mengingatkan Ito Warsito, Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI). “Direktur STAN pada masa saya kuliah, Pak Sembiring, sangat disiplin. Hal ini juga diterapkan kepada para mahasiswa STAN,” kata Ito kepada Media Keuangan belum lama ini. Sang Direktur, lanjut Ito, selalu datang tepat waktu pada saat masuk kelas dan berpakaian rapi, bahkan berdasi sekalipun memakai kemeja lengan pendek.

Pendidikan karakter kebangsaan juga menjadi salah satu kelebihan STAN. Pada awal masuk STAN, menurut Ito, mahasiswa sudah diharuskan menghafal dan menyanyikan Mars STAN. “Sampai sekarang, meskipun sudah hampir 36 tahun berlalu, liriknya masih terus terngiang di kepala saya. Barangkali juga hanya di STAN, pada waktu saya kuliah, mahasiswa harus belajar mata kuliah Agama, Pancasila, dan Kewiraan masing-masing selama empat semester atau dua tahun penuh,” ujar Ito.

Kedisiplinan di STAN memang terasa di berbagai aspek kehidupan kampus sejak dulu. Direktur Utama Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP), Eko Prasetyo, mempunyai pengalaman menarik saat diharuskan menghapuskan peraturan zaman Belanda. “Di Program Diploma Spesialis Anggaran (sekarang Kebendaharaan Negara), kami diwajibkan menghapuskan isi *Indische Comptabiliteits Wet* (ICW) dan *Instructie voor de Algemeene Rekenkamer* (IAR) pasal per pasal,” kata Eko. Sebagai mahasiswa, dia sempat merasa aneh karena setelah puluhan tahun merdeka, Indonesia masih menggunakan undang-undang versi negara jajahan Belanda.

Hapalan di masa kuliah ini ternyata sangat membantu Eko ketika bekerja. “Saat saya bekerja di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tahun 1996, saya membuat surat penolakan atas tagihan kepada negara dengan dasar penolakan Pasal 35 IAR,” ujar Eko. Dia juga sampai hapal bunyi pasal 77 ICW tentang definisi dan tugas

bendaharawan negara.

Jika tidak disiplin, mahasiswa STAN mesti siap dengan resikonya. Cris Kuntadi, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan juga memiliki cerita tentang hal ini. “Dulu ada dosen kami bernama Pak Tafsil yang selalu naik angkot ketika mengajar. Suatu kali, dia berada dalam santu *angkot* dengan teman saya yang terlambat datang, namun absennya di kelas terisi,” kata Cris. Sang dosen kemudian memerintahkan mahasiswa tersebut membuat surat permohonan maaf kepada kampus dan dosen mata kuliah di mana dia terlambat. “Jika tidak mau, mahasiswa itu bisa dikeluarkan,” ujarnya lagi.

Membentuk karakter

Baik Heru, Ito, Eko, maupun Cris mengakui bahwa kedisiplinan semasa menempuh studi di STAN sangat berpengaruh dalam membentuk karakter mereka. Setelah lulus Program Master of Business Administration dari Harvard Business School di Amerika Serikat pada 1994, banyak tawaran pekerjaan dari perusahaan swasta menghampiri Ito.

“Saya menolak tawaran-tawaran tersebut karena masih ingin mengabdikan kepada negara,” kata Ito. Tawaran kembali datang pada saat krisis moneter 1997. Dia ditawarkan bekerja pada sebuah *investment bank* internasional dengan gaji dollar Amerika Serikat dan jumlah yang jauh lebih tinggi dari BUMN tempatnya bekerja waktu itu. “Namun, tawaran tersebut juga saya tolak karena saya beranggapan bahwa justru saat krisis, negara lebih membutuhkan keahlian dan pengetahuan saya,” ujarnya lagi.

Menurut Heru, pendidikan di STAN telah membentuk semangat juang yang di atas rata-rata bagi para mahasiswa. Ancaman *drop out* (DO) jika tidak mencapai batasan Indeks Prestasi yang ditentukan memaksa mahasiswa untuk selalu bekerja keras. “Kami mati-matian belajar supaya tidak kena DO,” kata Heru.

Senada dengan Heru, menurut Cris, ketatnya sistem perkuliahan di STAN juga terasa dari buku kuliah yang digunakan. “Sebagai anak IPA, saya mesti belajar dan mengerjakan seluruh soal akuntansi dalam buku berbahasa Inggris yang sangat tebal,” ujarnya. Di samping karakter pekerja keras, keempat alumni di atas sepakat bahwa kehidupan lingkungan kampus yang religius menjadi bekal tersendiri saat mereka bekerja dan berinteraksi dengan orang lain.

Kualitas dan daya saing

Ribuan alumni STAN mengabdikan diri di berbagai penjurur negeri dan institusi. Menurut Laily Prihatiningtyas, Mantan Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, kualitas dan daya saing para alumni tak bisa dipandang sebelah mata. “Pendidikan di STAN saya rasa cukup berhasil membentuk lulusan yang berintegritas dalam lingkungan profesional, dan juga sampai pada tataran tertentu dalam sikap pribadinya,” kata perempuan yang pernah dinobatkan sebagai Direktur Utama BUMN termuda itu.

Laily melanjutkan bahwa sistem pendidikan di STAN juga mendorong kemandirian mahasiswa untuk melakukan pengayaan materi. “Ini membuat lulusan STAN mempunyai kemampuan *problem solving* yang mumpuni,” ujar Laily. Pembiasaan selama masa kuliah untuk memenuhi *requirement* yang cukup ketat, lanjut Laily, juga membentuk sikap lulusan yang tidak gampang menyerah, memiliki persistensi yang ketat, serta bekerja seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan.

Peranan penting alumni STAN juga dirasakan Eko di LPDP, institusi yang kini dipimpinnya. “Alumni STAN di LPDP sangat kreatif dan memiliki kemauan belajar yang tinggi, walaupun mereka latar belakangnya akuntansi dan keuangan,” kata Eko. Mereka dinilai memiliki karakter kuat dan dapat menjadi motor dalam menggerakkan roda organisasi. Di LPDP, beberapa alumni STAN bahkan menjadi motor penggerak di bagian *human capital management* dan *marketing and communication*.

Sementara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Heru menilai lulusan STAN mampu melaksanakan tugas dengan baik, mudah bekerja sama dengan pegawai-pegawai yang sudah ada dan bahkan dengan kemampuan teknis yang sudah jadi, serta memiliki semangat juang yang tinggi. “Biasanya anak-anak STAN menjadi andalan di masing-masing kantor,” ujar Heru. Secara umum, lulusan STAN dipandang mempunyai militansi dalam bekerja dan berperilaku baik serta taat dalam beribadah. “Meskipun tentunya ada satu dua pengecualian,” ujar Heru.

Transformasi

Kini, STAN memasuki era baru. Institusi yang akrab dengan julukan Kampus Ali Wardhana itu



Foto
Arief
Kuswanadji

**Anca-
man *drop out* (DO) jika tidak mencapai batasan Indeks Prestasi yang ditentukan memaksa mahasiswa untuk selalu bekerja keras.**

telah berubah statusnya menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN). Dalam program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perubahan status STAN masuk ke dalam salah satu Inisiatif Strategis tahun 2015. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), sebagai unit yang membawahi STAN, membentuk Tim Transformasi Kelembagaan STAN untuk mempersiapkan STAN menjadi politeknik. Dalam perjalanannya, konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara intens dilakukan.

Perubahan status STAN menjadi PKN dilakukan dengan beberapa alasan. *Pertama*, organisasi dan tata kerja STAN harus menyesuaikan dengan pola standar yang berlaku untuk penyelenggaraan perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga hanya berupa vokasi.

Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi (terapan) adalah berbentuk politeknik atau akademi. Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan hingga program Magister dan Doktor Terapan, sedangkan Akademik hanya dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi sampai dengan jenjang D-III. Dari situ, STAN kemudian memilih bentuk politeknik. PKN STAN secara teknis akademik dibina oleh Kemenristek dan Dikti, sedangkan secara teknis fungsional akan dibina oleh Kementerian Keuangan.

Mohamad Azhari, mahasiswa tingkat III PKN STAN mengaku telah merasakan berbagai perubahan sejak STAN berubah status. Menurut mahasiswa yang menjadi salah satu delegasi Paris International Model United

Nations itu, pihak Sekretariat STAN telah melakukan sosialisasi dan *public hearing* yang cukup baik kepada seluruh mahasiswa. Di samping itu, perbaikan sistem perkuliahan dan fasilitas juga terasa. “Salah satunya adalah dukungan dari STAN dan BPPK kepada para mahasiswa yang mewakili kampus pada event-event internasional,” kata Azhari.

Ditemui di tempat terpisah, Direktur STAN Kusmanadji berharap PKN STAN dapat menjadi politeknik terbaik di tanah air. Saat ini, PKN STAN sedang melakukan proses penerimaan mahasiswa baru. Dilihat dari jumlah pendaftarnya, Kusmanadji mengatakan bahwa animo pelajar SMA untuk berkuliah di STAN masih sangat tinggi. “Angka yang masuk dalam sistem kami berjumlah sekitar 103.500 orang,” ujar Kusmanadji. Dari jumlah itu, formasi yang disetujui oleh Kementerian PAN-RB sekitar 3.650 calon mahasiswa.

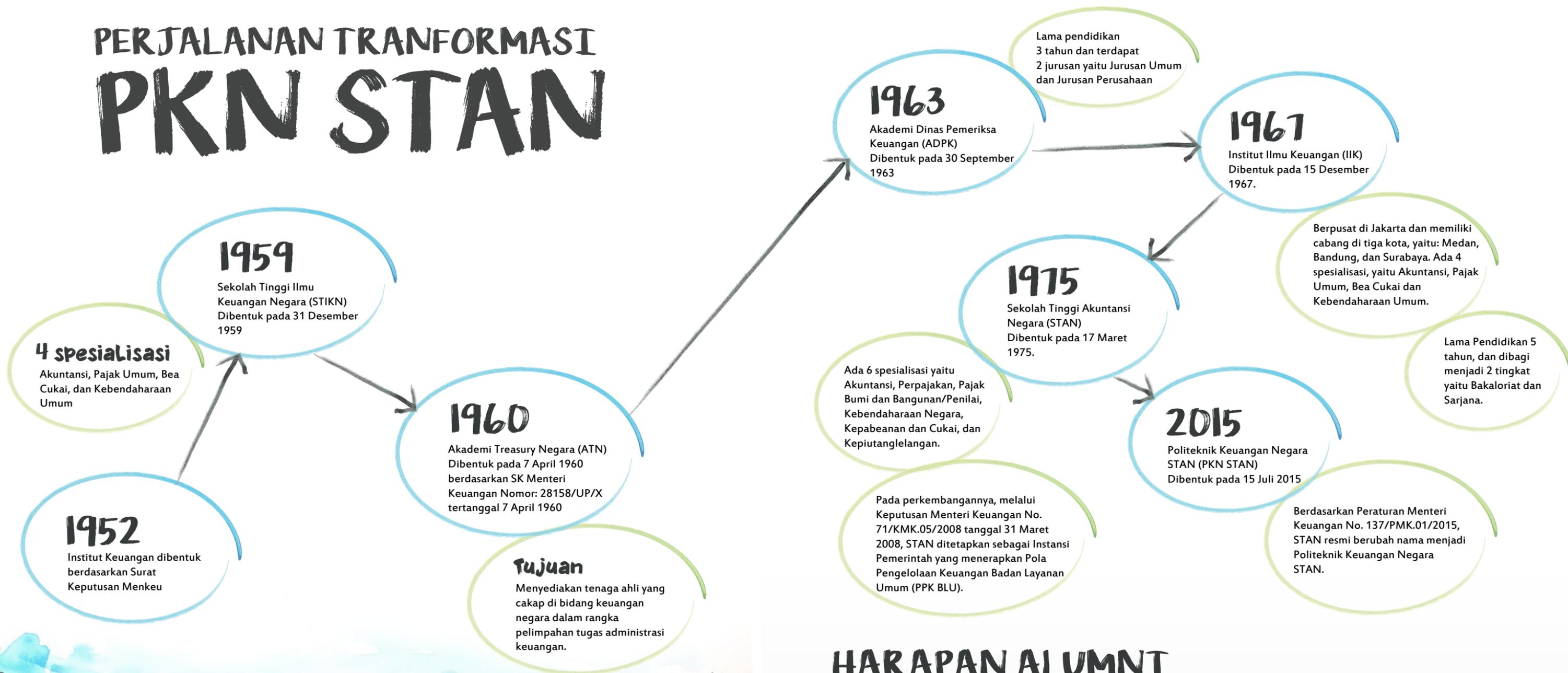
Harapan

Transformasi STAN menjadi PKN membawa angin segar dalam pengelolaan kampus plat merah itu. Dengan status PKN, STAN dapat menyelenggarakan pendidikan hingga level S2 dan S3. Menurut Kepala BPPK Sumiyati, dasar hukum menyelenggarakan pendidikan yang lebih tinggi telah disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK 01/2015 yang terbit pada Juli tahun lalu. Sumiyati berharap STAN dan juga BPPK dapat menjadi *centre of excellence* pengelolaan sumber daya manusia di bidang keuangan Negara.

Mewakili suara alumni, Eko berharap PKN STAN bisa bekerja sama dengan kampus-kampus terbaik di dunia. “Misalnya berkolaborasi menyelenggarakan kelas-kelas internasional yang bersifat *exchange program*. Di samping itu juga menghadirkan dosen dan profesor kenamaan dari kampus terbaik di luar negeri yang akan mampu mempercepat peningkatan kualitas menjadi *world class*,” kata Eko. Sementara Ito berharap PKN STAN akan tetap mengedepankan pendidikan dan pembinaan karakter pengabdian bangsa dan negara. Nama PKN STAN harus dititikberatkan pada nama Politeknik “Keuangan Negara” bukan “Politeknik Keuangan” (milik) Negara. “Dengan titik berat demikian, saya berharap para alumni STAN, di mana pun mereka akan berkarier, baik di sektor pemerintahan, BUMN atau sektor swasta, akan tetap menjadi agen-agen negara yang memikirkan keuangan negara,” ujarnya.

Teks Dwinanda Ardhi

PERJALANAN TRANSFORMASI PKN STAN



HARAPAN ALUMNI

SUMIYATI

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan

Harapan kami ke depan PKN STAN menjadi *leader* untuk pendidikan di bidang keuangan di Indonesia. Sebab kita memiliki *resource* paling lengkap, baik dari sisi pengalaman, pengetahuan, orang, hingga sistem.

ITO WARSITO

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (2009-2015)

Pendidikan karakter kebangsaan Indonesia menjadi salah satu kelebihan STAN. Saya berharap bahwa PKN STAN akan tetap mengedepankan pendidikan dan pembinaan karakter pengabdian bangsa dan negara kepada para mahasiswanya.

HERU PAMBUDI

Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan

Saya sangat berharap Politeknik Keuangan Negara STAN dapat menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang bertaraf internasional. Tidak hanya mendidik siswa dalam negeri, tetapi juga siswa luar negeri. Mudah-mudahan Politeknik STAN dapat mengambil peluang tersebut.

CRIS KUNTADI

Inspektur Jenderal
Kementerian Perhubungan

Saya mendorong agar STAN juga mengajak lembaga pendidikan internasional bidang akuntansi untuk mereview kurikulum STAN kemudian dikombinasikan dengan kurikulum internasional. Dengan demikian, ketika mahasiswanya lulus, tidak hanya berstandar nasional, tetapi juga berstandar internasional.

Penjaga Pintu Pertama

Meningkatnya kebutuhan atas pengelola keuangan negara menuntut manajemen pengelolaan sumber daya manusia berkualitas. Inilah PKN STAN, pintu pertama pencetak aparatur keuangan negara yang berintegritas.



Foto
Dok. Biro KLI

Tak kurang dari seratus ribu orang melakukan registrasi *online* untuk mengikuti Ujian Saringan Masuk Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Maret lalu. Di tengah merebaknya isu negatif mengenai salah seorang lulusannya yang tersangkut kasus korupsi, tak sedikitpun menyurutkan antusiasme masyarakat untuk mendaftar. Fasilitas pendidikan bebas biaya ditambah kesempatan mendapatkan ikatan dinas setelah lulus ternyata masih menarik minat publik.

Akhir tahun 2015 menjadi periode menentukan bagi PKN STAN sebagai transformasi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id, saat ini PKN STAN tidak sekadar menjadi pendidikan kedinasan. “STAN resmi menjadi (PKN STAN) institusi yang setara dengan (lembaga) pendidikan tinggi lain di Indonesia,” ujar Bambang.

Mulanya, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan yang kini lebih dikenal dengan sebutan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) memiliki sejumlah pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat). Pusdiklat tersebut bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan, anggaran, pajak, maupun bea cukai.

Kemudian, Menteri Keuangan mendapat amanah sebagai Bendahara Umum Negara sehingga dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan fungsi pengawasan. Untuk membantu Menteri Keuangan menjalankan fungsi tersebut, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu melakukan pemeriksaan laporan Keuangan dengan disiplin ilmu akuntansi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan ialah membuat pusdiklat akuntansi negara. Namun menurut Sumiyati, Kepala BPPK Kementerian Keuangan, pusdiklat belum dapat memenuhi kebutuhan akan SDM yang mumpuni di bidang akuntansi negara.

“Kita sadar, tidak bisa bikin (mencetak) akuntan lewat pusdiklat, tidak akan cukup ilmunya. Maka pusdiklat akuntansi diselenggarakan melalui STAN sehingga programnya berbeda dengan pusdiklat lain,” tuturnya.

Pendirian STAN pada saat itu memiliki tiga dasar hukum. *Pertama*, Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13945/MPK/1975 tentang Persetujuan Penyelenggaraan STAN di lingkungan Departemen Keuangan. *Kedua*, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1976. *Ketiga*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Sejumlah aturan tersebut, lanjut Sumiyati, sering dikatakan memiliki kedudukan hukum yang kurang kuat karena belum dibuat dalam bentuk Undang-Undang. Barulah pada tahun 2012, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Ternyata, berdasarkan aturan itu, keberadaan STAN sebagai lembaga pendidikan tinggi dianggap tidak sesuai lagi.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melakukan transformasi penyesuaian sistem dengan mengubah STAN menjadi politeknik. Melalui terbentuknya PKN STAN, Menteri Keuangan mengatakan bahwa mulai saat ini Kementerian Keuangan dapat menyelenggarakan pendidikan hingga jenjang doktoral. Keberadaan PKN STAN ini juga bertujuan untuk menghasilkan aparatur keuangan negara yang berkompeten dan berintegritas sehingga mereka mampu berkontribusi bagi keuangan negara dan daerah.

Sumiyati menjelaskan bahwa pengelolaan STAN sangat berbeda dengan pengelolaan PKN STAN. STAN merupakan pusdiklat yang murni menyelenggarakan pendidikan secara akademis. Setelah bermetamorfosis,

PKN STAN tidak hanya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

“PKN STAN menjalankan Tri Darma perguruan tinggi sesuai dengan jalur vokasi (terapan). Menghasilkan orang-orang yang siap turun ke lapangan karena benar-benar untuk menjawab, memberikan solusi atas kebutuhan di lapangan, bukan untuk akademik saja, bukan semata-mata itu. Fokusnya pada keuangan negara,” jelas Sumiyati.

Berubah

Sejalan dengan Kepala BPPK, Direktur PKN STAN, Kusmanadji, mengungkapkan bahwa STAN memang bukan perguruan tinggi meskipun bernama sekolah tinggi. Padahal sejak sekitar tahun 2000-an, Kementerian Keuangan telah berusaha mengajukan perubahan tetapi kala itu regulasi yang ada belum memungkinkan terjadinya perubahan.

“Ketika itu (penyelenggaraan) pendidikan kedinasan ada (memiliki) kecenderungan untuk di-stop (dihentikan). Kita punya program studi yang resmi diakui dan disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi rumahnya bukan perguruan tinggi, (melainkan) praktis Pusdiklat sehingga Pusdiklat mengerjakan tugas perguruan tinggi. Dilematis,” ungkapnya.

Setelah PKN STAN resmi diluncurkan, Kusmanadji mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur secara

khusus mengenai pengelolaan pendidikan kedinasan. Meskipun demikian, kampus yang memiliki sepuluh program studi (prodi) ini telah memiliki dua prodi yang mendapatkan status akreditasi B, yaitu Diploma-1 Kepabeanaan Cukai dan Diploma-1 Kebendaharaan Negara.

Kusmanadji memaparkan bahwa pihaknya telah menjalankan tridharma perguruan tinggi yang tidak hanya mengedepankan sisi pendidikan, tetapi juga penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terkait pengembangan kapasitas penelitian, PKN STAN tengah merintis kerja sama dengan unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. “Kita sudah rintis apa kebutuhan penelitiannya, dan (menganalisis) peluang, apa yang dapat kita teliti,” ujar Kusmanadji.

Sementara terkait pengabdian kepada masyarakat, PKN STAN telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan SKK Migas. Bentuk pengabdiannya dengan membantu melakukan *audit compliance* dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) antara SKK Migas dan pihak penyedia. Di samping itu, baru-baru ini PKN STAN juga melakukan kerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bidang pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan serta akuntansi.

Terkait kurikulum, pada sisi mata kuliah di PKN STAN masih mengikuti kurikulum sebelumnya saat menjadi STAN. Sementara, pada sisi pembuatan skripsi, PKN STAN telah menyesuaikan kurikulum yang ada saat ini dengan Standar

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang berlaku bagi seluruh perguruan tinggi.

Tantangan yang dihadapi oleh PKN STAN saat ini ialah memenuhi sumber daya manusia sebagai pengajar. Sebelumnya, pengajar STAN dikenal dengan widyaiswara. Setelah menjadi PKN STAN, maka status pengajarnya haruslah seorang dosen yang mengabdikan pada tridharma perguruan tinggi. “Ini tantangan terbesar. Untuk memenuhi jumlah minimal saja tidak mudah.”

Untuk memenuhi syarat akreditasi, setiap prodi harus memiliki sedikitnya enam dosen tetap sehingga secara keseluruhan, dari sepuluh prodi yang ada di PKN STAN membutuhkan 60 dosen tetap. Tantangan berikutnya ialah memenuhi rasio 1:30 (satu dosen mengampu 30 mahasiswa). Dengan perhitungan jumlah tersebut, dari total 6.000 mahasiswa yang dimiliki PKN STAN, maka jumlah kebutuhan pengajar mencapai 200 dosen.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, PKN STAN membuka peluang bagi para widyaiswara maupun pegawai di Kementerian Keuangan untuk bergabung menjadi dosen. Ke depan, tak menutup kemungkinan PKN STAN akan merekrut pengajar dari kalangan non Pegawai Negeri Sipil untuk bergabung menjadi dosen, tetapi syaratnya harus memiliki kualifikasi pendidikan doctoral.

Kemudian, Kusmanadji menuturkan bahwa bila sebelumnya tidak ada pengelolaan alumni, maka sekarang PKN STAN telah memiliki unit yang bertugas mengelola kemahasiswaan dan alumni. Tujuan utamanya supaya ada perhatian dari alumni dengan almamater. Kedua, memastikan agar para alumni saling membantu dan saling menjaga bukan malah berkolusi untuk kejahatan.

Terakhir, Kusmanadji berharap bahwa PKN STAN tidak hanya dapat melayani kebutuhan Kementerian Keuangan, melainkan kebutuhan publik di seluruh Indonesia. “Cita-cita kita PKN STAN menjadi *the best* politeknik dan diakui secara internasional. Yang harus tetap dijaga ialah integritas dan kualitas di penerimaan mahasiswa. Pintu pertama yang harus dijaga. Tidak ada yang namanya KKN disana, betul-betul harus dari hasil seleksi tidak ada penerimaan yang lain,” paparnya.

Teks lin Kurniati



Menyambut Kemenkeu Corporate University

Dewasa ini semakin banyak organisasi yang membentuk *corporate university*. Namun belum banyak yang mengetahui, apa sebenarnya perubahan yang ditawarkan. Secara sederhana, *corporate* berarti korporasi dan *university* berarti sekolah tinggi. Dengan demikian, *corporate university* dapat dimaknai universitas yang berada dalam suatu organisasi.

Foto
Dok. Biro KLI

Untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan dunia sekitar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai merasa perlu mengadaptasi rancangan serupa. Melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) saat ini Kemenkeu tengah melakukan upaya untuk membentuk Kemenkeu Corporate University. Sumiyati, kepala BPPK menuturkan, Kemenkeu Corporate University tidak akan tertuang pada struktur organisasi sebab yang disesuaikan adalah paradigmanya. “Jadi, jangan membayangkan BPPK nanti menjadi universitas yang tunduk ke Dinas Pendidikan Tinggi, tidak seperti itu. Yang kita ubah adalah konsep pembelajarannya”, kata Sumiyati.

Dijelaskan Sumiyati lebih lanjut, saat ini tugas BPPK semakin banyak. Bukan hanya menawarkan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, namun juga menyelenggarakan sertifikasi di bidang keuangan. Di samping itu, ruang lingkup penggunanya semakin luas. Mulai dari unit-unit di Kementerian Keuangan hingga Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya. “Kita perlu proses pembelajaran yang lebih strategis untuk pengembangan SDM keuangan Negara,” kata Sumiyati.

Dalam rangka menyiapkan Kemenkeu Corporate University, BPPK telah melakukan konsultasi dengan beragam institusi, salah satunya dengan Pertamina Corporate University (CPU) yang telah berjalan sejak tahun 2012. Ihsanuddin Usman, Vice President CPU mengatakan sebenarnya kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) dan Corporate University relatif sama. Hal mendasar yang membedakan adalah sistem perencanaan dan keterlibatan pengguna yang lebih dalam. Jika Pusdiklat biasanya menawarkan program diklat, maka pendekatan Corporate University adalah memastikan kesiapan SDM untuk mendukung tujuan organisasi. “Corporate University harus mencari tau kepentingan bisnis dan harus berbicara dengan manajemen sebagai pengarahnya,” tutur Ihsanuddin.

Perbedaan lainnya, jika Pusdiklat cenderung menjadi penyedia *training*, maka Corporate University berbicara tentang *development* ke depan. Pendekatannya integratif, jangka panjang dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing

individu. Ihsanuddin mencontohkan, jika suatu unit ingin membentuk seseorang Kepala Seksi menjadi Kepala Bagian dalam jangka waktu 5 tahun, maka harus disusun formula pelatihan yang dibutuhkan secara bertahap setiap tahunnya, baik *hard skill* maupun *soft skill*. “Sebab itu, basis data per individu harus diperkuat. Kompetensi yang dimiliki setiap insan di Kementerian Keuangan harus terdokumentasi dengan baik”, katanya

Kalau di universitas biasa ada mahasiswa, maka di Corporate University para pegawai yang menjadi mahasiswanya. Tugas sebagai pendidik, dekan dan rektornya juga dilakukan pegawai di internal Kementerian Keuangan, khususnya yang berada pada posisi manajerial. Menurut Ihsanuddin, pengajar dari internal akan lebih baik dalam melakukan *transfer knowledge*. Pemimpin internal juga lebih bisa memberikan gambaran mengenai kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Namun, jika dibutuhkan, Kemenkeu Corporate University juga bisa mengundang dosen tamu dari luar organisasi.

Pada dasarnya, untuk setiap bidang akan ada pemimpin yang berperan sebagai pembina atas jalannya diklat. Sumiyati mengungkapkan, jumlah pegawai Kementerian Keuangan saat ini kurang lebih 70 ribu orang. Tugas fungsi, keterampilan, dan pengalamannya sangat beragam. Seluruh sumber daya inilah yang akan dimanfaatkan oleh Kemenkeu Corporate University “Semua pengetahuan di Kementerian Keuangan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan negara harus kita simpan sehingga bisa diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan di manapun. Di sisi lain SDM keuangan Negara harus selalu siap belajar,” tukasnya.

Ihsanuddin mengingatkan, selain komitmen dan perhatian pimpinan, keberhasilan sebuah Corporate University sangat dipengaruhi oleh keinginan pegawai untuk meningkatkan kemampuan atas kesadaran sendiri. Sebab itu, sistem pendidikan perlu disusun dengan jelas agar hasilnya nyata baik bagi pegawai maupun bagi organisasi. “Kalau program diklat bisa menjawab apa sih ukuran dan keuntungan yang didapat bagi karir atau bahkan penghasilan pegawai, otomatis peserta akan tertarik dengan sendirinya”, tutup Ihsanuddin.

Teks Irma Kesuma

PKN STAN Siap Menjawab Tantangan

Tranformasi memberi nuansa baru pada PKN STAN. Lulusan PKN STAN kini siap mengawaki pengelolaan keuangan negara di negeri ini.



Kepala BPPK Sumiyati.

Foto lin Kurniati

Kebudayaan STAN di dunia pendidikan nasional tak perlu diragukan lagi. Kampus yang awalnya bernama Pusdiklat Akuntansi Negara ini telah menghasilkan lulusan yang siap menjawab tantangan pengelolaan keuangan negara republik ini. Kini, STAN telah bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Sistem pengajaran keuangan negara akan lebih modern, profesional, dan siap mendukung tercapainya target *core* bisnis organisasi induk. Simak wawancara Media Keuangan dengan Kepala BPPK Sumiyati mengenai seluk-beluk transformasi PKN STAN.

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) telah banyak mencetak alumni yang kini sukses sebagai pengambil kebijakan negara. Adakah keterkaitan dengan pola pendidikan STAN? Bagaimana pandangan Anda terhadap hal ini?

Pola pendidikan akuntansi di STAN pada tahun 1970-an tentu berbeda dengan saat ini. Saat Pusdiklat Akuntansi Negara berubah menjadi STAN pada tahun 1975, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengembangkan sendiri kurikulum pendidikan dan metode belajar di STAN. Jadi kurikulumnya tidak mengikuti kurikulum perguruan tinggi lainnya. Bisa dibayangkan, beban kuliah di STAN di masa lalu begitu berat. Kuliah dari hari senin sampai sabtu. Satu jam pelajaran adalah 60 menit.

Sistem belajarnya tidak hanya teori dan latihan soal. Hampir semua kasus dan permasalahan di buku teks harus dikerjakan sampai habis. Dulu mahasiswa dididik oleh para pejabat Kemenkeu. Bahkan pejabat Eselon I sering mengajar untuk pelajaran terkait kebijakan keuangan negara. Jadi yang mengajar adalah para *policy maker* (pembuat kebijakan). Mahasiswa tidak hanya mengetahui teknis mengerjakannya, tapi juga mengetahui alasan mengapa kebijakan itu dirumuskan.

Para pengajar sekaligus pengambil kebijakan merupakan orang yang paling mengerti teknis di lapangan. Maka, contoh kasus yang diberikan ke mahasiswa untuk dipelajari merupakan kasus nyata. Bahkan kasus yang benar-benar terjadi di lapangan seringkali dijadikan bahan ujian. Tidak heran kalau para lulusan STAN benar-benar siap terjun ke lapangan. Hal ini agak berbeda dengan universitas yang memang fokus ke akademik. Lulusan STAN ditujukan untuk menjawab kebutuhan di lapangan.

Pada November 2015, Menteri Keuangan meresmikan PKN STAN. Apa sebenarnya yang mendasari STAN berubah menjadi politeknik, bukan universitas?

Penataan organisasi STAN mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi. Tentunya kita harus taat pada asas perundang-undangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan, ada tiga jalur pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Mengingat keberadaan STAN sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan di bidang keuangan negara, maka wujud yang cocok adalah politeknik. Kita juga diberi izin menyelenggarakan pendidikan program studi diploma satu, diploma tiga, dan diploma empat. Bahkan nanti ada program strata dua dan strata tiga vokasi.

Apa perbedaan mendasar pengelolaan PKN STAN dengan STAN?

Saat ini, PKN STAN benar-benar dikelola layaknya perguruan tinggi. Sebagaimana halnya perguruan tinggi, PKN STAN harus tunduk pada Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan jalur kita yang merupakan vokasi di bidang keuangan negara, maka Tri Dharma Perguruan Tinggi juga harus kita sesuaikan arahnya dengan peningkatan kualitas bidang keuangan negara.

Bagaimana perubahan pengelolaan pengajar di STAN dengan PKN STAN? Adakah kendala yang dihadapi?

Setelah bertransformasi menjadi PKN STAN, pengajar tidak lagi berada di bawah Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dosen PKN STAN harus mematuhi peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Jadi, widyaiswara tunduk pada LAN, dosen PKN STAN tunduk pada Kemenristek Dikti.

Masalahnya, widyaiswara yang mulai mengabdikan sejak tahun 1980-an tidak membayangkan kelak akan ada perubahan organisasi. Hal ini terkait perubahan status dari widyaiswara menjadi dosen. Kendala para widyaiswara yang beralih menjadi dosen yakni pengumpulan dokumen penugasan sejak awal hingga saat ini. *Alhamdulillah* kita mencoba mencari solusinya, bisa dicari bersama data dukungannya.

Apa harapan Anda terhadap PKN STAN dalam konteks pendidikan nasional?

Harapannya, PKN STAN dapat menjadi *leader* di bidang keuangan di Indonesia. Boleh dikatakan kita memiliki resources terlengkap, baik dari sisi pengalaman, pengetahuan, sumber daya manusia, sistem, dan sebagainya. Data dan informasi itu semuanya ada di Kementrian Keuangan. Saya juga berharap semua lulusan PKN STAN nanti benar-benar menjadi sumber daya manusia yang andal.

Mengikuti visi dan misi Kemenkeu, semoga PKN STAN menjadi salah satu perguruan tinggi di bidang keuangan negara yang terbaik di kancah internasional, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Kita sudah mulai dilirik oleh negara lainnya. Sudah ada beberapa surat masuk dari negara lain untuk permohonan diklat. Ini jadi tantangan buat kita.

Teks Pradany Hayyu

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pendalaman Pasar Keuangan

Foto
Dok. Biro KLI

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pendalaman Pasar Keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Latar belakang penandatanganan MoU tersebut ialah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang memadai, pendalaman pasar keuangan serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait.

Ruang lingkup dalam MoU ini meliputi pembentukan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). MoU ini juga meliputi kerja sama perencanaan dan percepatan implementasi kebijakan yang terkait dengan semua unsur pasar Keuangan, serta pertukaran data dan informasi.

“Keberadaan pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid dan efisien

merupakan salah satu faktor penting. Ini untuk meningkatkan ketersediaan dana pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan dan inklusif,” jelas Menkeu selepas menandatangani MoU di Aula Djuanda, Kemenkeu, Jumat (08/04).

Menteri Keuangan memandang bahwa pasar keuangan Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga. Contohnya, lanjut Menkeu, dana deposito relatif rendah dibandingkan PDB yaitu hanya sebesar 40,7 %. Angka ini jauh tertinggal dari Singapura yang mencapai 137% dan Malaysia yang sebesar 95 %.

Disisi lain, menurut Gubernur BI, Indonesia masih memiliki ruang yang besar untuk bertumbuh. Namun, kurang dalamnya pasar keuangan menyebabkan kurangnya ketersediaan dana untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan. “Pasar

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan



keuangan yang dalam dan likuid seperti kita cita-citakan masih jauh dari harapan kita,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap upaya pendalaman pasar keuangan ini dapat dibarengi pengawasan dalam prosesnya. “Pendalaman pasar keuangan ini harus diikuti dengan pengawasan agar pendalaman ini tidak selalu diasosiasikan dengan risiko yang besar juga,” katanya.

Sebagai informasi, FK-PPPK akan dikoordinasikan oleh salah satu anggota secara bergantian dengan periode kerja selama satu tahun. Untuk pertama kali, Kemenkeu akan mengoordinasi FK-PPPK dan dilanjutkan oleh BI serta OJK. FK-PPK akan bersinergi dalam menyusun strategi nasional yang komprehensif, untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Teks Amelia Safitri

"Lulusan STAN ditujukan untuk menjawab kebutuhan di lapangan."

Sumiyati
Kepala BPPK

Apresiasi dan Penghargaan pada 24 Wajib Pajak Besar



Foto
Dok. Biro KLI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 24 Wajib Pajak Besar yang terdaftar di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Auditorium Cakti Budhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (5/4).

Apresiasi dan penghargaan ini diberikan atas kontribusi besar para Wajib Pajak terhadap penerimaan perpajakan. Pada tahun 2015, kontribusi Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp338,85 triliun, atau hampir 32 persen dari total penerimaan pajak nasional. Selain itu, penghargaan ini juga diberikan dengan pertimbangan bahwa para Wajib Pajak tersebut patuh dan kooperatif dengan para petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing.

Wajib Pajak yang memperoleh penghargaan tersebut terdiri atas

23 Wajib Pajak Badan dan satu Wajib Pajak Orang Pribadi. Masing-masing wajib pajak itu terdaftar pada empat KPP Wajib Pajak Besar yang berada di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Melalui penghargaan ini, DJP berharap para Wajib Pajak tetap berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya lebih baik. Selain pemberian penghargaan, DJP juga berencana menggelar pertemuan rutin dengan para Wajib Pajak yang diadakan secara sektoral. Pertemuan dilakukan untuk mendiskusikan berbagai permasalahan di lapangan dan membantu para Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan mereka dengan baik. Hal ini penting, mengingat para Wajib Pajak Besar sering memiliki permasalahan yang kompleks.

Wajib Pajak Besar penerima penghargaan yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu yaitu PT Bank Central Asia Tbk., PT Astra Sedaya

Finance, The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd., PT Adaro Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Newmont Nusa Tenggara. Selanjutnya, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Unilever Indonesia Tbk., PT Krama Yudha Tiga Berlianmotors, PT Samsung Electronics Indonesia, dan PT Jawa Power.

Adapun yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Tiga yaitu PT Pertamina (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III. Terakhir, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Empat yaitu Bank Indonesia, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan Ir. Arifin Panigoro.

Teks Novita Asri H.

Geliat Ekonomi Banyuwangi

Foto
Dok. Biro KLI



Mendengar nama Banyuwangi yang terbayang di benak adalah pesona keindahan Kawah Ijen. Dahulu, Banyuwangi hanya menjadi tempat persinggahan penumpang, sebelum menyebrang ke Bali. Namun kini, kapupaten yang diberi julukan “*The Sunrise of Java*” ini menjadi kota tujuan, setelah tumbuh pesat dan bertransformasi menjadi daerah yang modern dan berbudaya. Kepada Media Keuangan, Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi menceritakan bagaimana caranya mengembangkan Banyuwangi.

Saat pertama memimpin Banyuwangi, apa yang terlintas di benak Anda?

Setiap pemimpin melihat kotanya dengan cara berbeda. Bagi saya Banyuwangi perlu ada perubahan *image*. Dulu, Banyuwangi memang terkesan sebagai kota mistis, tertinggal, dan terisolasi. Bahkan penduduk asli Banyuwangi yang tengah merantau malu menyebutkan dari mana dirinya berasal. *Image* itu harus diubah agar wisatawan dan investor mau datang.

Selain itu, perilaku masyarakat juga perlu diubah. Misalnya, dari yang tadinya budaya tidak bersih menjadi bersih. Anak-anak mudanya didorong untuk bangga dengan budaya daerahnya. Kita bikin festival-festival budaya dengan lagu tema “I Love Banyuwangi” agar mereka bisa lebih optimis dan punya kepercayaan diri kepada daerahnya. Dengan begitu, mereka menjadi lebih kreatif untuk turut membangun mempromosikan Banyuwangi.

Apa yang menjadi sektor unggulan Banyuwangi?

Sekitar 43 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi disumbang oleh sektor pertanian dan perikanan. Sisanya baru sektor lain seperti industri dan jasa. Sejak tahun



2010 kami menjadikan pariwisata sebagai payung untuk menggerakkan sektor-sektor lain. Pariwisata efektif untuk menggerakkan ekonomi. Apabila bulan ini promosi akan bikin *event*, bulan depan sudah ada wisatawan yang berkunjung. Otomatis kalau berkunjung pasti mengeluarkan uang di Banyuwangi, mulai dari penginapan, makan, transportasi, oleh-oleh, dan sebagainya. Pariwisata bukan semata untuk menarik uang, namun sekaligus menjadi alat konsolidasi budaya dan perubahan.

Aksi apa yang pertama dilakukan untuk menggerakkan pariwisata?

Program 100 hari pertama saya adalah mengoperasikan Bandara Blimbingsari. Dahulu jarak tempuh Surabaya sebagai pusat ekonomi Indonesia timur ke Banyuwangi bisa mencapai 8 jam melalui jalur darat, kini hanya 50 menit. Bagi para wisawatan dan investor, jarak dan waktu adalah komponen penting dalam melakukan perjalanan. Bandara Blimbingsari merupakan bandara yang strategis karena lokasinya sangat dekat dengan Bali. Ditopang akses jalan yang baik dengan kota-kota di sekitarnya, Banyuwangi kini menjadi kota yang penting dalam kemajuan perekonomian Jawa Timur.

Bagaimana mengantisipasi dampak sosial yang muncul seiring pertumbuhan ekonomi?

Kami melaksanakan konsolidasi budaya, birokrasi, masyarakat, dan penguatan ekonomi rakyat. Dalam program

100 hari, saya menjaga psikologi birokrasi dengan tidak melaksanakan mutasi selama 6 bulan pertama. Rekrutmen PNS dengan IPK minimal 3,5 kami terapkan untuk memperkuat SDM penyelenggara layanan publik. Dulu *image* PNS pekerjaannya santai, pagi-pagi sudah nongkrong di warung kopi. Namun, saat ini tidak terjadi lagi, semua sudah sibuk bekerja.

Masyarakat juga ikut andil dalam mewujudkan program pembangunan daerah. Forum-forum pertemuan dengan masyarakat menjadi ajang untuk mengetahui persoalan-persoalan di masyarakat. Misalnya saja potensi gangguan di lapangan, evaluasi pelaksanaan pelayanan publik, serta sosialisasi program-program pemerintah daerah.

Seperti apa penguatan ekonomi rakyat yang dilakukan?

Banyuwangi ingin menjadi daerah maju dengan akar budaya yang membumi. Untuk menguatkan perekonomian masyarakat, mulai tahun 2011 kami melakukan kebijakan proteksi pasar. Misalnya, melarang penyajian buah impor pada setiap acara yang diselenggarakan mulai dari tingkat RT hingga kabupaten. Tujuannya untuk meningkatkan konsumsi dan produksi buah lokal.

Pasar tradisional ditata kembali dengan membatasi pendirian minimarket dan *mall*. Alun-alun kota juga hanya diperbolehkan untuk pentas kesenian rakyat. Pentas musik dangdut dan musik *rock* dilarang dilaksanakan di alun-alun. Selain itu, kami melarang pembangunan hotel di kawasan wisata tertentu yakni di Pantai Pulau Merah. Kebutuhan penginapan bisa dicukupi dengan menggunakan *homestay* yang dikelola oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung bagi masyarakat sehingga dampak sosial yang akan terjadi dapat diminimalisir.

"Banyuwangi ingin menjadi daerah maju dengan akar budaya yang membumi."

**Abdullah
Azwar Anas
Bupati
Banyuwangi**

Pasar modern dan hotel penting bagi investasi. Mengapa pembangunannya dibatasi?

Di kawasan lainnya, kami tentu mengizinkan pembangunan hotel, namun harus bintang 3 ke atas. Hasil investigasi kami, hotel melati tidak mendukung pariwisata, hanya dijadikan tempat singgah sesaat. Kami juga membatasi *mall* dan tempat hiburan malam. Selama ini keberadaan *mall* masih sekedar gaya hidup, seolah mencerminkan daerah maju padahal belum tentu. Kalau Banyuwangi terlalu gaduh, apa bedanya dengan kota besar lain?

Semua ini perlu strategi dan kemasan yang menarik karena segmentasi wisata di Banyuwangi adalah khusus mereka yang ingin menikmati keindahan alam. Suasana ramai bisa dirasakan di kota besar. Orang yang datang ke Banyuwangi umumnya mencari ketenangan, seperti ke Kawah Ijen, pantai-pantai, air tejun, dan tempat pemandian alam. Sebab itu, kami tidak perlu banyak *mall* apalagi karaoke dan diskotek.

Banyuwangi merupakan kota kabupaten digital society pertama di Indonesia. Seperti apa konsepnya?

Masyarakat harus didorong untuk memanfaatkan teknologi. Saat ini kami sudah memasang 1.500 titik WiFi di Banyuwangi, tersebar di pusat pemerintahan, rumah sakit, Puskesmas, sampai tempat ibadah. Kalau tidak dengan IT, pelayanan akan berjalan lambat. Ada desa yang perlu waktu empat jam untuk sampai ke pusat kota. Pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan di Banyuwangi sudah berbasis IT. Sistem *online* bisa memangkas birokrasi sehingga semua bisa menjadi lebih cepat.

Baru-baru ini kami menggagas “smart kampung” dimana pelayanan publik seperti Surat Pernyataan Miskin (SPM), surat keterangan lahir mati pindah dan datang, akte kelahiran, pengurusan kartu

keluarga cukup di desa/kelurahan karena sudah terkoneksi. Balai desa kami lengkapi dengan WiFi dimana anak-anak sekolah bisa mencari informasi dan mengerjakan PR di sana. Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, kami juga meluncurkan “Banyuwangi Mall” dalam bentuk virtual. UMKM yang berpotensi kami bantu pasarkan di *online marketplace* dengan menggandeng *Corporate Social Responsibility* (CSR) pihak ketiga.

Pada akhir 2015, Banyuwangi meraih Prestasi Dana Insentif Daerah (DID). Apa arti penghargaan ini bagi Anda?

DID merupakan kemenangan untuk masyarakat Banyuwangi karena hal ini menunjukkan bahwa semua dana pemerintah dialokasikan tepat guna untuk kesejahteraan rakyat. Ini juga memacu kami agar bisa lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Prestasi DID berhasil diraih karena Kabupaten Banyuwangi memperoleh predikat WTP tiga tahun berturut turut mulai tahun 2012. Sejak masa jabatan saya, APBD selalu ditetapkan tepat waktu. Bahkan APBD 2016, ditetapkan tanggal 3 November 2015, jauh sebelum batas waktu penetapan tanggal 31 Desember.

Apa cita-cita Anda terhadap Banyuwangi ke depan?

Banyuwangi mengkonstruksikan diri sebagai kota humanopolitan atau kota untuk manusia. Membangun sebuah kota bukan berarti harus mengembangkan pusat belanja dan kawasan industri semata. Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana membangun kota sehingga menjadi ruang huni yang nyaman bagi manusia dengan kemanusiaannya. Banyuwangi sebagai kota humanopolitan adalah Banyuwangi yang modern dengan tetap menjaga identitas diri sebagai kota yang religius dan berkebudayaan kuat.

Teks Irma Kesuma

Melayani dengan SEHATI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, DJKN

Keterbatasan tak menghalangi munculnya inovasi. Tujuh inovasi teknologi informasi diciptakan di kantor yang berada nun jauh di timur Indonesia.

Satu dekade yang lalu, sebagian masyarakat Indonesia masih asing dengan Kota Sorong yang berada di Pulau Papua atau yang sering disebut Pulau Cendrawasih. Kini, siapa yang tak kenal kota yang memiliki banyak pesona itu. Ribuan wisatawan berbondong-bondong mengunjungi Kawasan Konservasi Raja Ampat melalui Kota Sorong. Statistik peningkatan wisatawan tiap tahunnya sangat fantastis. Keindahan Raja Ampat tidak hanya menarik perhatian wisatawan domestik, wisatawan mancanegara justru menempati porsi terbesar.

Di surga wisata inilah berdiri Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong yang telah menorehkan banyak inovasi. Kantor yang berlokasi di provinsi Papua Barat ini berhasil menjadi Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik Tahun 2015 di lingkungan

Kementerian Keuangan. Prestasi ini bukanlah suatu akhir, namun awal bagi seluruh jajaran pegawai KPKNL Sorong untuk memberikan layanan terbaik bagi *stakeholders*.

KPKNL Sorong berada di Gedung Keuangan Negara Sorong, Jalan Basuki Rahmat Km. 7 kota Sorong, provinsi Papua Barat. Salah satu keunikan kantor ini adalah kondisi geografis wilayah kerja KPNKL Sorong yang bergunung-gunung, sehingga moda transportasi utama adalah angkutan udara. Kepala KPKNL Sorong Nikodemus Sigit Rahardjo mengungkapkan, wilayah kerja KPKNL Sorong terbilang sangat luas, yakni terdiri dari 14 kabupaten/kota. Total pegawai yang berjumlah 21 orang tidak akan bisa menjangkau wilayah kerja tersebut. Oleh karena itu, kinerja KPKNL Sorong sangat mengandalkan pemanfaatan teknologi informasi (TI).

Teknologi untuk lebih melayani

“Inovasi kami merupakan cara supaya KPKNL Sorong bisa lebih mendekati diri dengan *stakeholders*,” tutur Sigit. Bagi KPKNL Sorong, TI merupakan alat utama dalam mengatasi kendala geografis wilayah kerjanya. Sebagai bukti, terhitung tujuh aplikasi yang telah diciptakan. Salah satu aplikasi unggulan KPKNL Sorong adalah APUSE yang merupakan kependekan dari Aplikasi Pengelolaan Kekayaan Negara Untuk SEHATI (Senyum, Efektif, Handal, Adil, Tertib, Inovatif). APUSE bertujuan agar komunikasi KPKNL Sorong dengan satuan kerja dapat terjalin dengan baik. Penyebaran informasi pun dapat dilakukan secara cepat, terutama untuk menjangkau daerah yang jauh dan memiliki akses transportasi sulit.

APUSE terbukti efektif meningkatkan jumlah pelaporan dari satuan kerja (satker). Pada tahun 2014 terhitung hanya

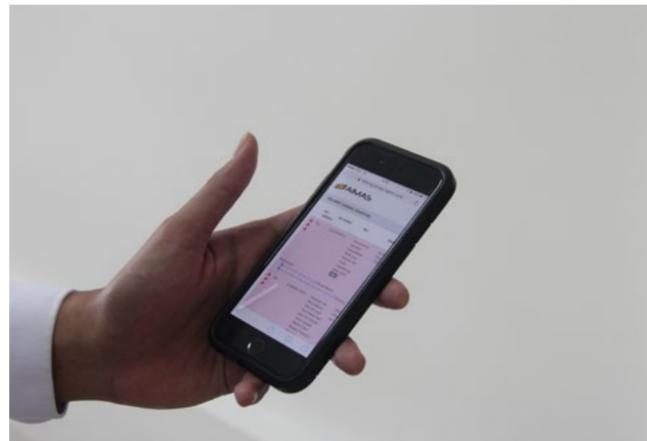
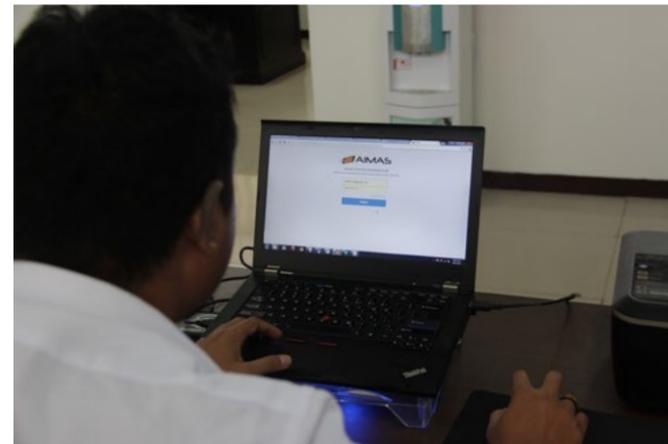


Foto
Dok. KPKNL
Sorong



18 satker yang mengirimkan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara. Setelah ada APUSE di tahun 2015 meningkat menjadi 128 satker. Aplikasi yang berbasis sistem Android dan IOS untuk *smartphone* ini berisi informasi KPKNL secara umum. User juga dapat mengakses informasi dasar hukum, syarat administrasi, proses penyampaian dokumen, hingga *push notification* mengenai *update* kegiatan pengelolaan kekayaan negara. APUSE juga telah mendapat apresiasi kategori Penghargaan Inovasi Untuk Peningkatan Kinerja dari Menteri Keuangan dalam Roadshow Transformasi Kelembagaan di Makassar pada 22 Mei 2015.

Inovasi lain dalam bidang TI yang mendukung kinerja KPKNL Sorong adalah Aplikasi Monitoring Administrasi Surat (AIMAS), Aplikasi Monitoring Laporan Non-Single Sign On, Aplikasi Online Critics Complaint and Suggestion (OCCSI), Aplikasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL), Aplikasi Monitoring Perjalanan Dinas, serta Aplikasi Buku Pelayanan (Si Bulan). Tampak jelas bahwa digitalisasi telah

diterapkan dalam kinerja KPKNL Sorong, baik dalam lingkup internal maupun dalam layanan kepada *stakeholders*.

Bekerja dengan SEHATI

Sigit mendukung penuh jajaran pegawai untuk mewujudkan KPKNL Sorong menjadi kantor percontohan modern. Untuk mencapai itu, Sigit berupaya mengimplementasikan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan di lingkungan kerja. Nilai-nilai tersebut dituangkan melalui motto pelayanan KPKNL Sorong, yaitu SEHATI. Sehati merupakan kependekan dari Senyum, Efektif, Handal, Adil, Tertib, dan Inovatif. “Seluruh jajaran KPKNL Sorong harus mempunyai rasa sehati antara satu dengan yang lain sehingga hubungan kerja harmonis tetap terjaga,” tuturnya.

KPKNL Sorong membuktikan bahwa kendala dan hambatan bukanlah alasan untuk tidak berinovasi. Kondisi geografis yang bergunung-gunung dan terbatasnya transportasi membuat betapa mahal biaya hidup di Papua. “Selalu ada hikmah di balik kesulitan yang kami hadapi. Kami dituntut untuk selalu berinovasi dan

multitasking,” jelas Sigit yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Makassar. Strategi yang ditempuh selain pemanfaatan TI yakni melalui sinergi dengan unit Kementerian Keuangan lainnya, seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai di wilayah kerja KPKNL Sorong.

KPKNL Sorong berdiri di tengah kearifan lokal masyarakat Papua. Pada umumnya masyarakat asli Papua Barat memiliki karakter ramah dan murah senyum. Untuk itu, pegawai KPKNL Sorong menyapa mereka dengan sebutan Pace (Bapak) dan Mace (Ibu). Masyarakat Papua akan merasa dihargai dan sebagaimana berada di rumah sendiri. “Kami beruntung KPKNL Sorong memiliki pegawai yang merupakan putra daerah asli Papua Barat,” kata Sigit. Lebih lanjut, Sigit berharap Kementerian Keuangan dapat merekrut pegawai yang merupakan putra daerah untuk ditempatkan di kantor-kantor operasional Kementerian Keuangan di Papua dan Papua Barat.

Teks Pradany Hayyu

Tekad Terbaik

Berada di balik layar atas sejumlah agenda internasional bukan perkara sederhana. Apalagi kepentingannya terkait diplomasi ekonomi antarnegara. Syurkani bangun tekadnya untuk selalu memberi pelayanan prima.

Kala petang menjelang, tampak seorang anak laki-laki bergegas kembali ke rumah setelah seharian bermain bersama teman-temannya. Tepat saat azan Magrib berkumandang, ia langsung berangkat ke mushala untuk shalat dan belajar mengaji. Ialah Syurkani Ishak Kasim yang memiliki masa kecil kental dengan budaya dan nilai-nilai Islami.

Dibesarkan di bumi Serambi Mekah, Syurkani – panggilan akrabnya, sadar betul bahwa ia tumbuh di lingkungan yang sangat kuat menjalankan syariat agama. Itulah sebabnya, sejak dini, putra pasangan Ishak Kasim dan Rohana ini telah ditanamkan sikap yang disiplin dan demokratis oleh kedua orangtuanya.

“Saya juga diajarkan batasan kebebasan dengan tidak melanggar rambu-rambu yang ditetapkan. Kalau saya lupa (melanggar), beliau (orang tua) akan mencari sendiri dimana saya berada saat itu. Begitu bertemu, saya akan dibawa pulang ke rumah dan diberi hukuman. Menghukum itu mengajarkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang harus dihindari,” kenangnyanya.

Memasuki usia remaja, pria kelahiran Aceh Utara, 19 Agustus tahun 1971 silam ini melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Syiah Kuala mengambil jurusan Manajemen Keuangan. Pasca lulus, Syurkani mencoba peruntungan dengan melamar pekerjaan di berbagai tempat, termasuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan.

Hasilnya, pada tahun 1995, Syurkani diterima sebagai pelaksana Biro Perencanaan dan Hubungan Luar Negeri di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sejak itulah anak keempat dari enam bersaudara ini ditugaskan pada bidang kerja sama internasional hingga saat ini. Selain penugasan tersebut, Syurkani secara *ad hoc* sempat ditugaskan menangani *early warning system* dan membantu pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan, khususnya terkait perencanaan dan monitoring kegiatan.

Syurkani pernah pula menangani pengelolaan risiko atas proyek-proyek dengan pembiayaan luar negeri. Salah satu proyeknya berupa pemberian *letter of comfort* oleh Menteri Keuangan bagi pihak swasta yang ingin memanfaatkan dana internasional. Syurkani juga diberi penugasan lain di luar area analisis ekonomi dan Keuangan internasional.

Berbuah manis

Pada mulanya, Syurkani mengaku berat ketika bekerja sebagai abdi negara. “Awal saya bergabung, penghasilan bisa dibilang pas-pasan, sementara kebutuhan hidup di Jakarta sangat besar. Ditambah lagi, saat itu saya sudah bekerja di salah satu bank BUMN ternama sekaligus diterima bekerja di salah satu perusahaan otomotif nasional. Kalau mikir besaran gaji, saya mungkin sudah keluar namun keyakinan saya kuat. Saya akan memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas melalui sekolah,” ungkapnya.

Keputusan Syurkani untuk memilih Kementerian Keuangan ternyata berbuah manis. Pada 1999, Syurkani mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan pasca sarjana (S2) di State University of New York at Buffalo. Melalui program Professional Human Resource Development (PHRD), Syurkani memilih bidang keuangan korporasi (*corporate finance*) dan ekonomi internasional sebagai konsentrasinya.

Sekembalinya dari Amerika, Syurkani ditempatkan pada Bagian Kerja Sama Pembangunan Islam, Teknik Luar Negeri dan Kontribusi Organisasi Internasional, Biro Kerja sama Luar Negeri. Setahun kemudian, Syurkani dipercaya sebagai Kepala Subbagian Forum Menteri Keuangan APEC, Bagian Kerja sama Ekonomi Internasional pada Biro Kerja sama Luar Negeri.

Beberapa tahun berselang, terjadi reorganisasi di Kementerian Keuangan. Reorganisasi ini menyebabkan Biro Kerja sama Luar Negeri bergabung dalam Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja sama Internasional (BAPEKKI) yang kini

dikenal sebagai Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Lalu, Syurkani ditempatkan pada Pusat Kerja sama Internasional, Bidang Kerja sama dalam kawasan Asia Pasifik sebagai Kepala Subbidang Kerja sama Keuangan Asia Pasifik.

Perjalanan berikutnya, pria yang memiliki hobi *landscape photography* ini kembali memperoleh kesempatan meraih gelar Doktor di Victoria University Melbourne, Australia dalam 3,5 tahun. Dalam disertasinya, Syurkani menyimpulkan bahwa kebijakan moneter di Indonesia dapat dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi oleh pelaku pasar dan rumah tangga. Selanjutnya, dalam waktu bersamaan, kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi pengambil keputusan untuk menentukan harga-harga di pasar.

Sekembalinya ke tanah air, Syurkani dipromosikan sebagai Kepala Bidang Kerjasama Inter Regional di Pusat Kebijakan Internasional. Selanjutnya pada 2011, Syurkani ditunjuk sebagai Kepala Bidang Forum G20, sebuah unit baru yang ditugaskan untuk menangani keterlibatan Indonesia dalam agenda-agenda G20, khususnya bidang ekonomi dan Keuangan.

Menurut Syurkani, kala menjabat sebagai Kepala Bidang Forum G20 inilah dirinya merasa memiliki tantangan tersendiri. “Bidang ini menjadi perhatian karena menangani penyiapan substansi dan perumusan kebijakan bagi Menteri Keuangan dan Presiden (dalam KTT). Tantangan terberat yang saya hadapi ialah menyesuaikan ritme kerja saya, dari sebelumnya menangani kerja sama dengan negara-negara Asia (berubah) ke ritme kerja negara-negara maju,” ujarnya.

Uniknya, Syurkani juga menghadapi tantangan lain terkait budaya dan tradisi pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan di APEC maupun forum Asia lainnya, kata Syurkani, biasanya pembahasan agenda lebih mengedepankan budaya Asia. Tak jarang dalam setiap *meeting*, kerap kali disisipi acara yang menampilkan kebudayaan setempat.

Sebaliknya, dalam pertemuan G20, umumnya pembahasan agenda dilakukan



Syurkani Ishak Kasim

TEMPAT/TANGGAL LAHIR:
Aceh Utara/
9 Agustus 1971

PENDIDIKAN:
Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Syiah Kuala (1995), Master of Arts, International Economics University of New York (2002), Doktor of Philosophy in Economics (2010).

RIWAYAT JABATAN:
Kepala Subbidang Forum Menteri Keuangan APEC (2005-2005), Kepala Subbidang Kerja sama Forum Keuangan Asia Pasifik (2005-2006), Kepala Bidang Kerja sama Inter Regional (2010-2011), Kepala Bidang Forum G20 (2011-2015), Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2015-sekarang).

secara serius, tanpa ada sisipan acara kebudayaan sebagaimana terdapat pada forum Asia. “Hampir tidak ada waktu istirahat. Paling berat saat *communiqué drafting*, kadang bisa berlangsung dua hari dua malam, dari pagi hingga pagi berikutnya (keesokan harinya) hingga seluruh isi *communiqué* disepakati.”

Bila dalam forum Asia, para peserta *drafting* umumnya menyerahkan hasilnya pada kesepakatan suara mayoritas maka hal berbeda terjadi pada pertemuan G20. Setiap wakil negara akan bersikeras mempertahankan pendapat mereka walau harus melewati malam panjang hingga pagi tiba.

Akhirnya, pada 2014, Syurkani diamanahkan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) sebelum akhirnya diangkat secara definitif satu tahun kemudian. PKPPIM merupakan unit yang menangani berbagai kerja sama dalam forum multilateral maupun kerja sama dengan lembaga keuangan internasional. PKPPIM juga menangani Penyertaan Modal Negara serta kontribusi keuangan pemerintah di lembaga dan organisasi internasional.

Ketika pertama kali ditugaskan, Syurkani membuat terobosan dengan mewajibkan semua stafnya untuk membuat dokumen *pending matters* dan dapat diakses oleh seluruh bidang. Dokumen tersebut berisi informasi mengenai berbagai pekerjaan yang tengah ditangani oleh setiap bidang sehingga dapat memudahkan bidang lain yang membutuhkan data terkait.

Di samping itu, setiap hari Jumat, Syurkani rutin mengadakan rapat pimpinan (rapim) untuk membahas *pending matters* dalam pekerjaannya. Materi tersebut nantinya akan dibawa dalam agenda rapim pusat. Syurkani juga mewajibkan setiap pegawainya membuat *work plan* (rencana kerja) untuk

satu tahun ke depan. Melalui *work plan*, beban kerja setiap pegawai, prioritas target kegiatan, serta berbagai kebutuhan dapat terorganisir dengan baik.

“Apa yang saya pelajari selama perjalanan karier saya ialah membangun tekad bahwa harus menyelesaikan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Saya juga bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan, siapapun pimpinan saya dan dimanapun saya ditugaskan,” tuturnya.

Harta terbaik

Di mata pria yang senang melakukan kegiatan di laut dan pantai ini, keluarga merupakan pendorong dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan optimal. Suami dari Fanni Amalita ini merasa beruntung memiliki anak dan istri yang memahami pekerjaan yang menyita waktu. “Mereka adalah harta terbaik,” katanya.

Dengan posisinya yang membutuhkan mobilitas tinggi, Syurkani selalu berusaha menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, terutama anak-anaknya. Ayah dari Naufal, Alya, dan Safin ini kerap menghabiskan waktu bersama dengan bermain *game*, atau sekedar menonton televisi. Tak menutup kemungkinan, tutur Syurkani, mereka makan di luar, atau menonton film di bioskop.

Ke depan, dalam karier, Syurkani tetap akan memberikan dukungan yang terbaik pada pimpinan. “Bila diberikan tanggung jawab lebih tinggi, tentu akan saya laksanakan dengan tekad terbaik.” Sementara dalam urusan keluarga, Syurkani berharap anaknya yang baru saja menempuh ujian akhir nasional nantinya akan lolos seleksi perguruan tinggi negeri. “Kita semua berharap akan meraih yang terbaik dalam hidup,” tegasnya.

Teks lin Kurniati

Gini Ratio dan Neraca Perdagangan Catat Hasil Baik



Kinerja dua indikator ekonomi, yaitu *gini ratio* dan neraca perdagangan, pada bulan April ini menunjukkan perbaikan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh *gini ratio*. Pada Maret tahun lalu, BPS mencatat *gini ratio* mencapai 0,41. Angka itu turun menjadi 0,40 pada September 2015. “Ini menandakan ketimpangan orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah,” kata Kepala BPS Suryamin dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Senin (18/4).

Lebih lanjut, BPS menyatakan bahwa *gini ratio* di daerah perkotaan pada September tahun lalu tercatat sebesar 0,42. Hasil ini turun 0,01 poin dibandingkan pada Maret 2015 sebesar 0,43. Sementara, *gini ratio* di daerah pedesaan pada periode yang sama relatif tidak berubah, yaitu sebesar 0,33.

BPS juga melaporkan bahwa distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan indikasi membaik selama periode Maret-September 2015. Angkanya meningkat dari 17,10 persen pada Maret menjadi 17,45 persen pada September. Jika dipetakan berdasarkan kategori daerah perkotaan, distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada periode yang sama

juga menunjukkan perbaikan. Hasilnya meningkat dari 15,83 persen pada Maret menjadi 16,39 persen pada September. Hal yang sama terjadi di daerah pedesaan. Distribusi pengeluaran di kawasan ini meningkat dari 20,42 persen pada Maret menjadi 20,85 persen pada September.

Suryamin menjelaskan bahwa penyebab utama turunnya *gini ratio* antara lain karena kenaikan upah buruh pertanian dan upah buruh bangunan. “Untuk upah buruh pertanian dari Maret ke September 2015 naik 1,21 persen, sedangkan upah buruh bangunan naik 1,05 persen,” kata dia.

Gini ratio selama ini menjadi indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah. Terdapat tiga level *Gini ratio*. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua, ketimpangan menengah, yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga, ketimpangan tinggi, yaitu berada di atas 0,5. Laporan BPS medio April ini menunjukkan bahwa level ketimpangan berada pada kategori menengah.

Surplus neraca perdagangan

Sementara itu, berdasarkan laporan Bank Indonesia, sebagaimana dikutip

dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Jumat (18/4), neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus pada Bulan Maret 2016. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara menjelaskan bahwa surplus didukung oleh kinerja perdagangan sektor nonmigas. Surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar 0,49 miliar dolar AS, turun dari surplus Bulan Februari sebesar 1,14 miliar dolar AS.

Untuk keseluruhan triwulanan, neraca perdagangan Indonesia triwulan I-2016 mencatat surplus sebesar 1,64 miliar dolar AS. Hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan surplus triwulan IV-2015 sebesar 0,45 miliar dolar.

Lebih jauh, surplus neraca perdagangan nonmigas tercatat sebesar 0,79 miliar dolar AS. Angka ini sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan surplus pada Februari yang mencapai sebesar 1,15 miliar dolar AS. Menurut Tirta, berkurangnya surplus nonmigas dipengaruhi oleh kenaikan impor nonmigas sebesar 7,88 persen (mtm) yang melampaui kenaikan ekspor nonmigas sebesar 3,58 persen (mtm).

Kenaikan impor nonmigas terutama didorong oleh naiknya impor biji-bijian, berminyak, mesin dan peralatan mekanik,

mesin dan peralatan listrik, plastik dan barang dari plastik, dan bahan kimia organik. Peningkatan impor nonmigas, khususnya mesin dan peralatan mekanik/listrik, lanjutnya, sejalan dengan kegiatan ekonomi domestik yang semakin membaik.

Sementara itu, kenaikan ekspor besi dan baja, bahan bakar mineral dan ekspor manufaktur terutama mesin/peralatan listrik, kendaraan dan bagiannya, serta berbagai produk kimia merupakan pendorong meningkatnya ekspor nonmigas. Neraca perdagangan migas sendiri mencatatkan defisit sebesar 0,30 miliar dolar AS, meningkat dari 0,01 miliar dolar AS pada Februari 2016. Peningkatan defisit tersebut dipengaruhi oleh kenaikan impor migas sebesar 36,25 persen (mtm), terutama impor minyak mentah, yang lebih besar dari kenaikan ekspor migas sebesar 10,40 persen (mtm).

BI menilai kinerja neraca perdagangan pada Maret 2016 dan keseluruhan triwulan I-2016 tersebut positif dalam mendukung kinerja transaksi berjalan. “BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat memengaruhi kinerja neraca perdagangan serta mengupayakan agar kegiatan ekonomi domestik terus berjalan dengan baik,” ujar Tirta.

Prediksi Bank Dunia

Pada pertengahan bulan ini, Bank Dunia mengeluarkan prediksi laju pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,3 persen pada tahun 2016 dan 6,2 persen pada tahun 2017-2018. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan

ekonomi dalam negeri mencapai 5,1 persen pada tahun 2016. Peningkatan pertumbuhan bisa terjadi pada tahun depan, yaitu berada di kisaran 5,3 persen.

Bank Dunia menggarisbawahi peningkatan bisa terjadi dengan catatan keberhasilan paket reformasi kebijakan dan implementasi program investasi publik yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam laporan *The East Asia and Pacific Update*, Bank Dunia menekankan pentingnya kebijakan makroekonomi yang cermat dan kelangsungan reformasi struktural.

Bank Dunia juga menyarankan seluruh negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk memperhatikan kebijakan fiskal agar dapat menghadapi kemungkinan adanya guncangan global. Apalagi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih akan melambat, sehingga akan turut melemahkan permintaan dan pertumbuhan di kawasan.

“Kawasan ini terbantu oleh kebijakan makroekonomi yang cermat, termasuk usaha meningkatkan pendapatan domestik di beberapa negara eksportir komoditas. Namun, guna mempertahankan pertumbuhan di tengah-tengah situasi dunia yang menantang, diperlukan kemajuan berkala dalam reformasi struktural,” ujar Wakil Presiden terpilih Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa sebagaimana dikutip dari laman Bank Dunia.

Tax Amnesty dan Panama Papers

Kinerja cukup baik yang terlihat dari indeks *gini ratio* dan neraca perdagangan belum diikuti dengan realisasi penerimaan perpajakan. Dalam

keterangan kepada wartawan di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Senin (7/3), Direktur Jenderal Pajak Ken Dwiugiasteady mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak per Februari 2016 baru mencapai sembilan persen dari target Rp1.360,1 triliun. Idealnya, lanjut dia, hingga akhir Maret 2016, realisasi penerimaan pajak bisa mencapai Rp340 triliun atau sekitar 25 persen dari target penerimaan pajak.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty untuk dibahas bersama DPR. Pemerintah berharap dana repatriasi yang berpotensi masuk jika RUU tersebut disahkan dapat menambah sumber pembangunan di samping target pajak. Apalagi, munculnya banyak nama Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Panama Papers semakin menegaskan pentingnya *tax amnesty*.

Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan bahwa data yang ada dalam Panama Papers akan menjadi tambahan yang dapat memperkaya data keuangan orang Indonesia di luar negeri. “Data Panama Papers akan kami pelajari dan pakai untuk *reconfirm* atas apa yang kita punya atau *complement*, karena data yang kita punya belum semua data,” kata Menkeu dalam seminar RUU Tax Amnesty dan Manfaatnya Bagi Bangsa, di Jakarta pada Selasa (5/4).

Menkeu menegaskan bahwa dari data yang ada saat ini sudah dapat diketahui pola penghindaran pajak yang ada, yaitu dengan membuat “perusahaan kertas” di beberapa “Surga Pajak”. “Yang pasti, dari data yang kita miliki, polanya adalah banyak orang Indonesia yang membuat *Paper Company* di beberapa *Tax Haven*,” tegas Menkeu.

Teks Dwinanda Ardhi

Masa Penawaran: 28 April s.d. 19 Mei 2016
Minimal Pemesanan: Rp5 juta | Maksimal Pemesanan: Rp5 miliar
Jenis Kupon: Kupon mengambang (disesuaikan setiap 3 bulan)
dengan tingkat kupon minimal 7,50%
Pembayaran Kupon: Tanggal 20 setiap bulannya
Tenor: 2 tahun (Terdapat Fasilitas *Early Redemption*)*

agen penjual tahun 2016



*syarat & ketentuan berlaku

Penerbitan Surat Utang Bagi Daerah

Teks Joko Tri Haryanto,
pegawai Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI*

Pemerintah cukup serius dalam meningkatkan efisiensi belanja di daerah. Buktinya enam daerah dengan rasio posisi kas tidak wajar dan di atas rata-rata nasional akan menerima konversi surat utang dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN) terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Keenam daerah tersebut adalah Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur. Menariknya, berdasarkan regulasi terbaru Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, daerah-daerah tersebut khususnya kabupaten, termasuk dalam daerah dengan peta kapasitas fiskal yang sangat tinggi.

Kabupaten Tanah Laut memiliki Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) sebesar 2,10, sementara Kabupaten Kutai Timur

sebesar 3,89. Yang paling mencengangkan adalah Kabupaten Berau dengan IFK mencapai 7,57, salah satu yang tertinggi diantara seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu, dalam kategori provinsi, IFK yang tertinggi diraih oleh Provinsi Riau sebesar 0,98, disusul Provinsi Banten sebesar 0,60 dan Provinsi Jawa Barat sebesar 0,30. Patut diperhatikan bahwasanya Provinsi Jawa Barat hanya memiliki IFK sebesar 0,30, bukan disebabkan oleh rendahnya kemampuan pendapatan daerah dalam APBD nya. Kondisi tersebut muncul lebih disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Provinsi Jawa Barat.

Secara keseluruhan, total jumlah SPN yang nantinya akan diterbitkan untuk keenam daerah tersebut mencapai kisaran Rp359 miliar. Dalam keterangannya, kriteria rasio kas tidak wajar dilihat dari selisih positif antara posisi kas Februari dengan kebutuhan belanja operasional dan 30 persen belanja

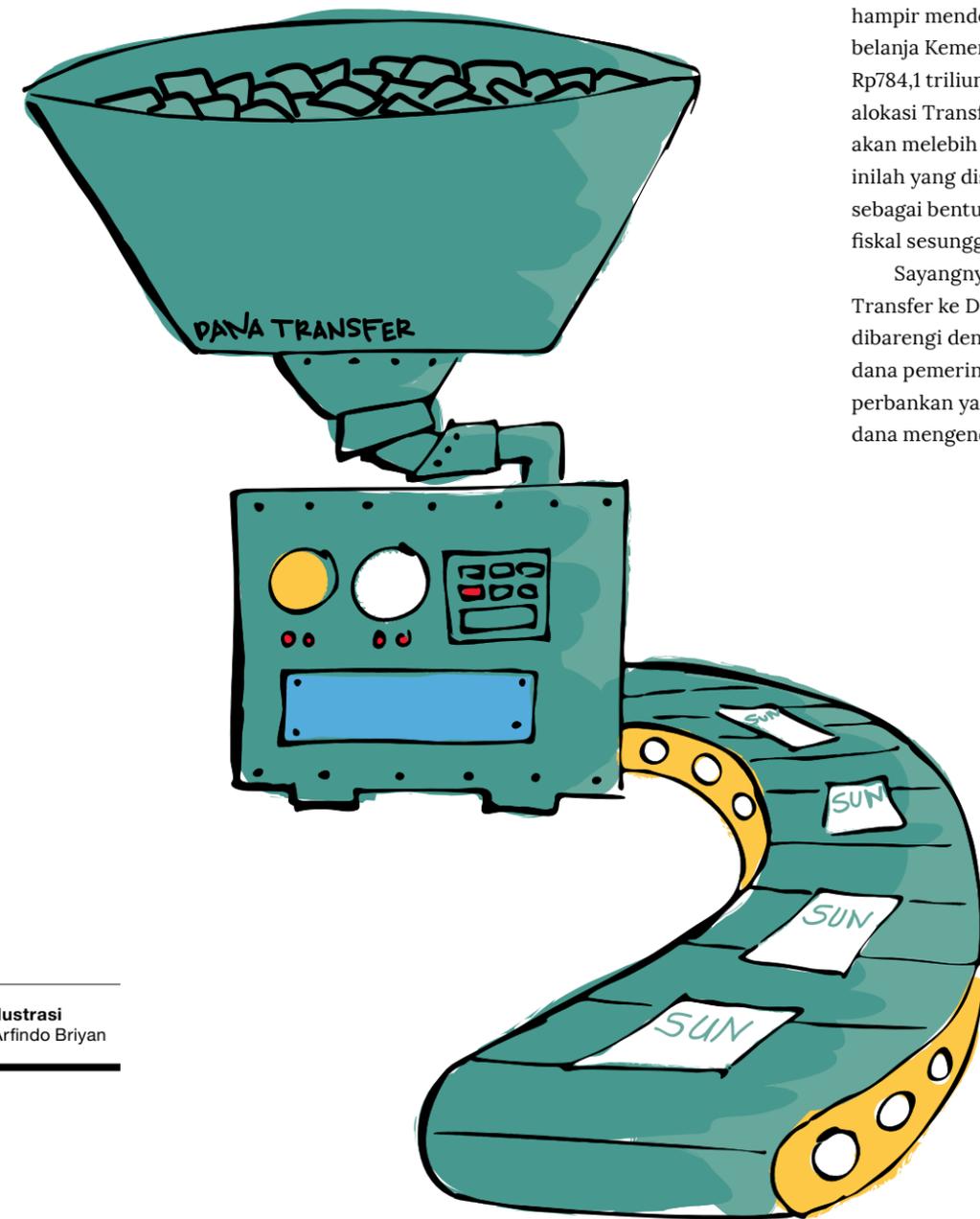
modal di bulan April, Mei, dan Juni. Sementara perhitungan rata-rata nasional dilakukan berdasarkan rasio posisi kas tidak wajar terhadap DAU selama 12 bulan. Selain mengkonversi, pemerintah juga merencanakan untuk menunda penyaluran DAU bulan April senilai Rp396,3 miliar terhadap 50 daerah lainnya yang hingga kini belum menyampaikan laporan posisi kas, perkiraan belanja operasi, serta 30 persen belanja modal di bulan April, Mei, dan Juni.

Dana menganggur di daerah

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya tak lepas dari munculnya fenomena dana *idle* di daerah yang terus meningkat. Dana yang mayoritas berasal dari Transfer ke Daerah tersebut sedianya digunakan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah sekaligus mengakselerasi kesejahteraan masyarakatnya. Namun, faktanya justru tidak memberikan dampak sesuai yang

diharapkan. Padahal realisasi Transfer ke Daerah sendiri terus meningkat dalam skala yang sangat signifikan. Di tahun 2016 saja misalnya, alokasi Transfer ke Daerah mencapai Rp770,2 triliun atau hampir mendekati alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp784,1 triliun. Bahkan, mulai tahun 2017, alokasi Transfer ke Daerah diprediksi akan melebihi alokasi belanja K/L. Hal inilah yang disebut oleh menteri keuangan sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal sesungguhnya.

Sayangnya, peningkatan alokasi Transfer ke Daerah tersebut juga dibarengi dengan tren kenaikan simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan yang mencerminkan besarnya dana mengendap di daerah. Menurut data



Ilustrasi
Arfindo Briyan

pemerintah, hingga November 2015 saja, jumlah simpanan dana pemda mencapai Rp247,4 triliun, untuk kemudian menurun di bulan Desember 2015 menjadi Rp99,7 triliun. Jika ditarik data sejarah selama lima tahun ke belakang, pola simpanan dana pemda selalu berfluktuasi naik hingga bulan Juni, mencapai puncaknya di bulan September, serta menurun dengan drastis di bulan Desember setiap tahunnya.

Banyak hal yang menjadi penyebab munculnya pola simpanan dana pemda di perbankan. Faktor pertama yang menjadi penyebab biasanya adalah pelampauan realisasi pendapatan yang diiringi dengan rendahnya serapan belanja di daerah. Faktor berikutnya adalah efek dari program efisiensi yang dilakukan di pos belanja daerah. Ada juga faktor dampak dari buruknya perencanaan, sehingga menyebabkan mangkraknya beberapa program di daerah, selain motif kecenderungan menempatkan simpanan pemda di perbankan dalam bentuk deposito yang menghasilkan jasa bunga.

Di beberapa kesempatan, efek gerakan nasional pemberantasan korupsi juga dijadikan alibi macetnya pelaksanaan program pembangunan di daerah. Belum lagi persoalan kehati-hatian para aparat Pemda dalam menghadapi proses lelang, khususnya terkait dengan banding dan sanggahan. Belum lagi persoalan konflik politik di daerah menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Suatu daerah aktivitas pemerintahannya biasanya akan lumpuh

ketika pasangan Kepala Daerah kemudian memutuskan untuk berpisah di tengah jalan dan siap beradu di Pilkada periode berikutnya. Terlebih jika keduanya memilih menggunakan kendaraan politik yang berbeda.

Dari uraian tersebut, menurut kaca mata pribadi penulis, sepertinya ada persoalan yang lebih kompleks yang dihadapi di daerah terkait dengan penyerapan anggaran. Solusi mengkonversi DAU menjadi SPN atau menunda pengalokasiannya sepertinya belum akan menjadi solusi dasar yang mujarab bagi daerah. Permasalahan mungkin akan mereda, namun tidak akan menghilangkan sama sekali. Bukan tidak mungkin juga kebijakan tersebut justru memiliki efek pembalikan bagai bom waktu di kemudian hari.

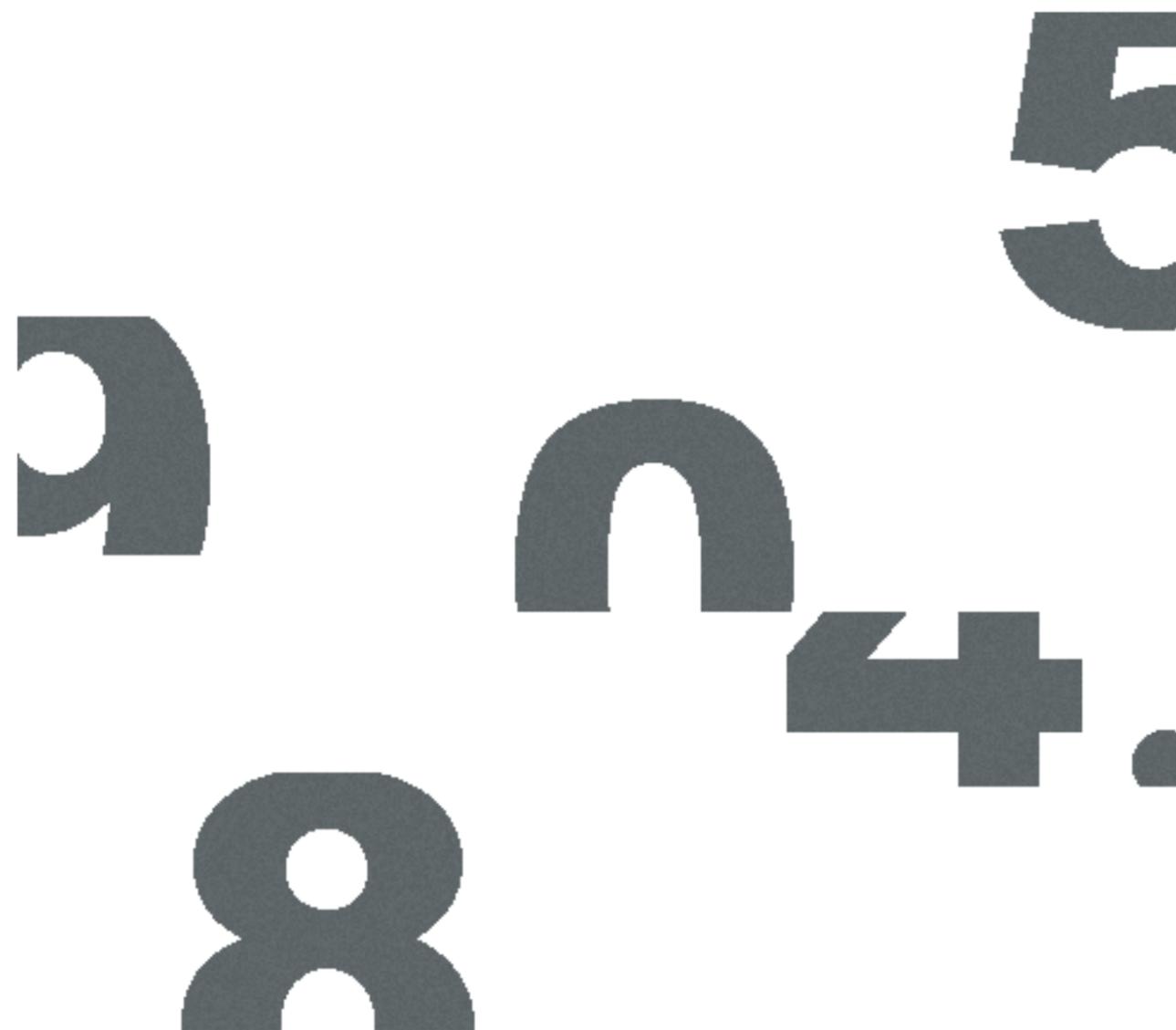
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemerintah juga mesti hati-hati di dalam menetapkan besarnya dana mengendap sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di daerah. Jika memang munculnya dana tersebut akibat faktor pelampauan target pendapatan daerah atau efisiensi belanja, maka hal tersebut justru wajib mendapat apresiasi. Dana Insentif Daerah (DID) misalnya, dapat menjadi salah satu instrumen yang digunakan dalam mengapresiasi pencapaian tersebut. Harapannya seluruh daerah menjadi termotivasi di dalam melakukan pelampauan kinerja pendapatannya, sehingga secara tidak langsung menciptakan aspek kemandirian

daerah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Sebaliknya, daerah dengan kategori dana mengendap yang besar akibat perencanaan program yang kurang tepat, wajib mendapatkan hukuman. Namun demikian, dana mengendap yang muncul akibat perencanaan program yang kurang berjalan, juga tidak selamanya menjadi kesalahan pemda. Beberapa kebijakan pemerintah pusat yang saling tumpang tindih, mau tak mau harus diakui juga turut menyumbang kebingungan acuan di level pemda. Dualisme pelimpahan kewenangan di sektor pertambangan antara provinsi dan kabupaten/kota misalnya, hanya sebagian kecil contoh *overlapping* kebijakan yang dimaksud. Belum lagi masalah perbedaan nomenklatur antara acuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri).

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah duduk bersama dengan perwakilan pemda untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih komprehensif dan menemukan solusi bersama yang implementatif. Jangan lagi daerah dijadikan ajang implementasi berbagai kebijakan pemerintah di level pusat yang ujung-ujungnya justru menjerat langkah masing-masing. Ketika sinergi ini berhasil diwujudkan, penulis yakin di situlah awalnya kebangkitan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.*



segera lakukan perubahan

Angka Pengenal Importir Umum (API-U) & Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sesuai dengan ketentuan terbaru

diikuti dengan perubahan data **Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)** pada aplikasi registrasi kepabeanan

selambatnya **30 Juni 2016**

telp.
1500225

email.
info@customs.go.id

Cerita Staf Khusus Menteri Termuda



Danang Rizki Ginanjar mungkin adalah salah satu staf khusus menteri termuda yang pernah dimiliki republik ini. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, Danang—biasa dia disapa—dipercaya oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, mengemban amanah tersebut. Dengan rekam jejak yang cemerlang, kontribusi Danang di dunia pemerintahan sangat menjanjikan.

Sudah hampir empat bulan Danang bekerja sebagai staf khusus. Masuk ke dalam dunia birokrasi adalah pengalaman baru baginya. Pria kelahiran Jakarta, 19 November 1983 itu sebelumnya bekerja pada sebuah perusahaan swasta dan membangun *start up* dari nol hingga beromset milyaran sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan S2 di University of Cambridge, Inggris.

“Rasanya *intriguing*,” kata Danang ketika ditanya perasaannya terjun ke dunia pemerintahan. Lulusan Jurusan Planologi dari Institut Teknologi Bandung itu mengungkapkan bahwa institusi pemerintahan saat ini sudah jauh berbeda. Di Bappenas, Danang memberi contoh, kultur pembelajar dan bekerja keras sudah sangat terbentuk. Apalagi 40-50 persen pegawainya merupakan lulusan S2 dan S3. “Setelah di dalam, saya tahu dan lihat betul bagaimana pegawai dari beragam level itu *stay* di kantor sampai tengah malam untuk bekerja,” ujarnya lagi. Kondisi yang tidak disangka Mantan Ketua Divisi Eksternal Himpunan Mahasiswa Planologi ITB itu membuatnya bukan hanya kagum, melainkan juga bertambah semangat menjalankan tugas.

Danang juga mengapresiasi Menteri Sofyan Djalil yang senang bekerja dengan anak-anak muda. Sebagai staf khusus, Danang diberikan ruang untuk

memberikan kontribusi pemikiran terhadap berbagai kebijakan, misalnya pada suatu ketika dia pernah ditugaskan untuk turut membuat presentasi rapat yang dipaparkan dalam rapat kabinet. Untuk mempersiapkan materi tersebut, Danang sempat tinggal di kantor selama tiga hari. Anak muda yang pernah menjadi Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum KM-ITB 2004 itu senang menjadi bagian dalam tugas langsung dari menteri. “Pak Sofyan mencari anak-anak muda yang *talented* untuk dibesarkan dan *dikasih* ruang untuk berkembang,” kata Danang.

Beasiswa Presiden

Sebelum ditunjuk menjadi staf khusus menteri, Danang telah banyak mencatatkan prestasi membanggakan. Salah satunya adalah menjadi penerima Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). BPRI merupakan

beasiswa yang sangat prestisius di mana hanya ada 109 penerima di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 48 *awardee* adalah perangkat aparaturnya pertahanan negara dari militer dan kepolisian. Sementara itu, 61 penerima lainnya adalah masyarakat sipil dari beragam latar belakang. “*Alhamdulillah* saat itu saya juga terpilih sebagai Ketua BPRI angkatan pertama,” ujar lulusan SMU Insan Cendekia, Serpong itu.

Di University of Cambridge, Danang mengambil program *Master of Business Administration* (MBA). Menurut Danang, kombinasi latar belakang pendidikannya sangat membantu dalam bekerja di lembaga perencanaan pembangunan. Program MBA di University of Cambridge memiliki kurikulum manajemen yang komplit dan terbaik, mulai dari pemasaran, manajemen operasi, budaya organisasi, hingga pengambilan keputusan.

Salah satu pengalaman paling penting yang didapatkan Danang selama menempuh studi di Inggris adalah kesempatan untuk terjun langsung mengimplementasikan ilmunya di lapangan. Selama satu bulan, Danang pernah ditunjuk menjadi konsultan senior untuk sebuah BUMN di Brazil. Di sana, dia dan tiga orang mahasiswa Cambridge lainnya membantu jajaran direksi dalam mengembangkan berbagai strategi manajemen untuk produk teknologi yang akan dijual di pasar Brazil dan negara-negara Amerika Selatan.

Kampus Harry Potter dan Stephen Hawking

Selain predikat sebagai salah satu kampus terbaik di dunia, kekaguman Danang terhadap University of Cambridge

juga timbul karena desain bangunan dan kultur kampus yang sekilas mirip dengan kisah dalam novel Harry Potter. Bangunan-bangunan kastil, jubah kebesaran, hingga asrama mahasiswa langsung mengingatkannya pada cerita penyihir Hogwarts itu. Menurut mantan anggota Penasehat Perhimpunan Pelajar Indonesia Cambridge itu, selain University of Cambridge, Pengarang JK Rowling juga terinspirasi dengan atmosfer dan kultur kampus University of Oxford.

Yang menarik, Danang berkesempatan mewujudkan mimpi masa remajanya di Cambridge. Impian itu adalah secara tidak sengaja bertemu dengan Ilmuwan Stephen Hawking. “Saya ingat sempat nakal dan mencongkel kaca jendela perpustakaan sekolah supaya bisa membaca ensiklopedia di hari libur,” kata Danang mengenang.

Di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di kaki gunung di Garut, Danang remaja gemar sekali membaca buku-buku karya Stephen Hawking. Saat duduk di bangku SMA, dia juga pernah menjadi anggota tim olimpiade fisika di sekolahnya. “Saya merinding bisa melihat Stephen Hawking secara langsung,” ujarnya.

Ketua Mata Garuda

Belum lama ini, Danang terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Penerima Beasiswa LPDP, Mata Garuda. Pada masa kepemimpinannya, Danang ingin mewujudkan misi *internally inclusive*, *externally professional* bagi Mata Garuda. “Hakikat ikatan alumni itu persaudaraan, kebersamaan, dan keakraban,” kata Danang. Dia berharap Mata Garuda secara internal dapat mengayomi

anggotanya dan secara eksternal dapat menjadi organisasi yang profesional.

Ada tiga kontribusi yang akan menjadi fokus Mata Garuda, yaitu sosial kemasyarakatan, kemitraan strategis sektor pemerintahan, dan swasta. Program sosial seperti Kado untuk Anak Indonesia akan dilanjutkan. Di samping itu, Mata Garuda juga akan lebih berkontribusi dalam pengaplikasian riset yang langsung bermanfaat bagi masyarakat hingga di perdesaan. Sementara di sektor pemerintahan, Danang berharap anggota Mata Garuda dapat secara langsung turut berkontribusi menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah, termasuk di daerah. Di sektor swasta, Danang mendorong anggota Mata Garuda yang memiliki semangat untuk mendirikan *start up* dan menjadi wirausaha. “Alumni yang menciptakan lapangan pekerjaan akan kita dukung,” kata Danang yang semasa kuliah S2 juga aktif dalam Cambridge Consulting Special Interest Group.

Rencana masa depan

Saat ini Danang sedang sangat bersemangat menjalani amanah sebagai staf khusus menteri. Di masa depan, Danang memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. “Kalau kita tidak senantiasa melakukan *up grade* terhadap diri, nanti kita akan tertinggal,” ujar Danang. Di samping melanjutkan pendidikan S3, Danang juga masih memiliki mimpi untuk memperoleh satu lagi gelar S2.

Teks Dwinanda Ardhi



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Kenaikan PTKP Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Teks Budi Sulisty, Pegawai Sekretariat Jenderal

Pada tahun 2015, Pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kini, Pemerintah kembali berencana untuk menaikkan *baseline* PTKP.

Rencana tersebut sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 April 2016. Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan mengusulkan kenaikan batas PTKP menjadi Rp54 juta per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta per bulan. Batas PTKP sebesar Rp36 juta sendiri ditetapkan pada pertengahan 2015 yang merupakan kenaikan sebesar 50 persen dibanding ketentuan sebelumnya atau sebesar Rp24,3 juta dengan payung hukum Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP.

Usulan Pemerintah tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR dan akan diberlakukan mulai bulan Juni 2016. Dengan usulan baru, batasan PTKP Rp54 juta untuk pekerja lajang, wajib pajak yang berpenghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan tidak lagi dipotong pajak penghasilan (PPh). Untuk besaran Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP)

yang kawin, istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, serta tambahan tanggungan anggota keluarga akan mengikuti *baseline* WP OP tersebut. Untuk wajib pajak kawin tanpa tanggungan (anak), batasan PTKP sejumlah Rp58 juta setahun, kawin dengan tanggungan 1 orang sebesar Rp63 juta per tahun. Dalam konsep *baseline* PTKP yang baru juga diatur mekanisme kawin dengan penghasilan istri digabung, hingga Rp126 juta per tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki tanggungan 3 anak.

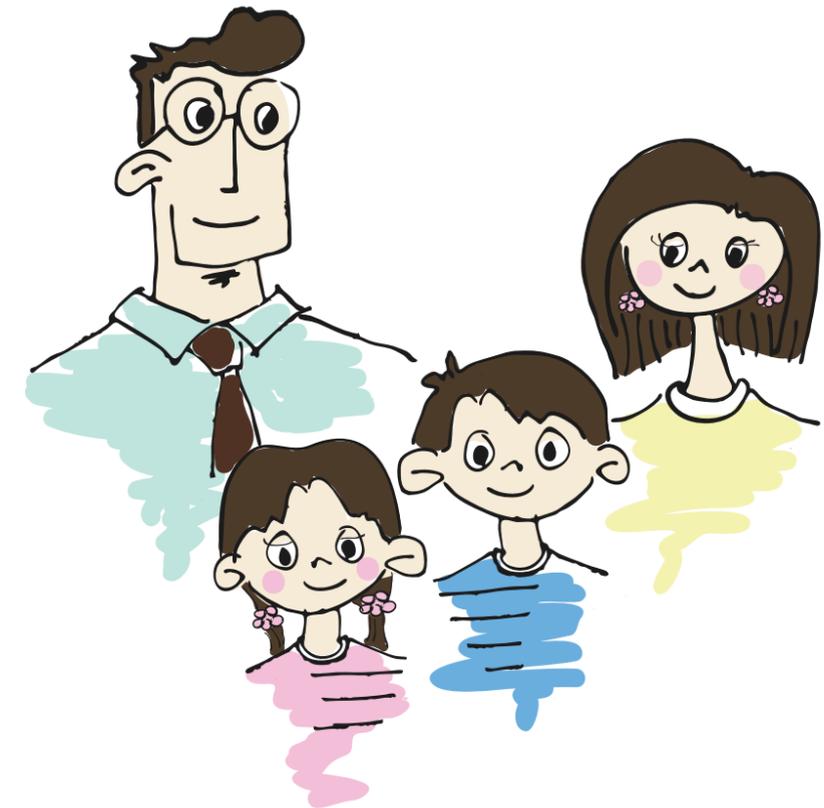
Kenaikan Target Pajak dan PTKP

Keputusan pemerintah yang cukup berani di tengah kenaikan target pajak tersebut mendapat sikap pro dan kontra dari masyarakat. Sikap kontra disuarakan karena saat ini pemerintah masih harus bekerja keras untuk memenuhi target pajak yang naik setiap tahun. Untuk APBN 2016, Pemerintah harus berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun. Banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk memperoleh target antara lain dengan intensifikasi, ekstensifikasi pajak maupun berharap pada kebijakan baru yaitu *Tax Amnesty* yang diperkirakan akan memberikan kontribusi pada penerimaan negara

sebesar Rp60 triliun. Dengan rencana kebijakan kenaikan PTKP, justru akan berpotensi menurunkan realisasi penerimaan pajak di tengah kepatuhan pajak yang masih rendah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, pada 2015 baru 27 juta wajib pajak pribadi yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan dari jumlah tersebut tercatat baru 10 juta yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Rasio pembayar pajak pun baru sebesar 0,9 persen dari total penerimaan pajak yang berasal dari 900 ribu wajib pajak atau senilai Rp9 triliun. Dari data tersebut, terlihat bahwa secara hitungan, kenaikan batas PTKP akan menggerus penerimaan negara.

Selain pendapat kontra, kenaikan PTKP juga dimaksudkan sebagai alat untuk menjaga tingkat inflasi. Dengan bergairahnya tingkat konsumsi masyarakat, pemerintah akan bisa mengendalikan target inflasi pada level 4 persen plus minus 1 persen. Efek lain adalah kenaikan PTKP akan mengikuti kenaikan upah minimum regional (UMP) yang menjadi salah satu indikator tingkat kelayakan hidup minimal bagi warga negara. Dengan dibebaskan dari pajak, pegawai dengan gaji UMP



akan bisa pengoptimalkan penggunaan penghasilannya.

Imbas positif lain adalah kenaikan batas PTKP akan memberikan *multiplier effect* pada pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penghasilan akan memberikan kesempatan wajib pajak untuk membelanjakan atau menambah konsumsi rumah tangga. Adanya kenaikan penghasilan yang disebabkan pembebasan pajak dikarenakan daya beli masyarakat bertambah besar. Bertambahnya pembelanjaan pada hal-hal yang bersifat konsumtif, antara lain dengan mencicil kendaraan ataupun membeli aset lain akan menggerakkan perekonomian. Sebagian pengalihan pendapatan akan diinvestasikan pada aset produktif. Dengan demikian, kenaikan PTKP akan memberikan *multiplier effect* lebih besar dibanding dengan turunnya penerimaan negara.

Pajak: Budgeter dan Regulator

Dalam menaikkan batasan PTKP, pemerintah harus dapat menjaga keseimbangan antara target penerimaan maupun menjaga stabilitas perekonomian. Menteri Keuangan pun mengakui usulan kenaikan PTKP akan berpotensi menurunkan penerimaan negara sebesar Rp18,9 triliun. Namun, meskipun pemerintah kehilangan setoran PPh dari kenaikan PTKP, imbas positifnya adalah dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat, akan terjadi kenaikan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan konsumsi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berimplikasi positif pada berkurangnya kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin.

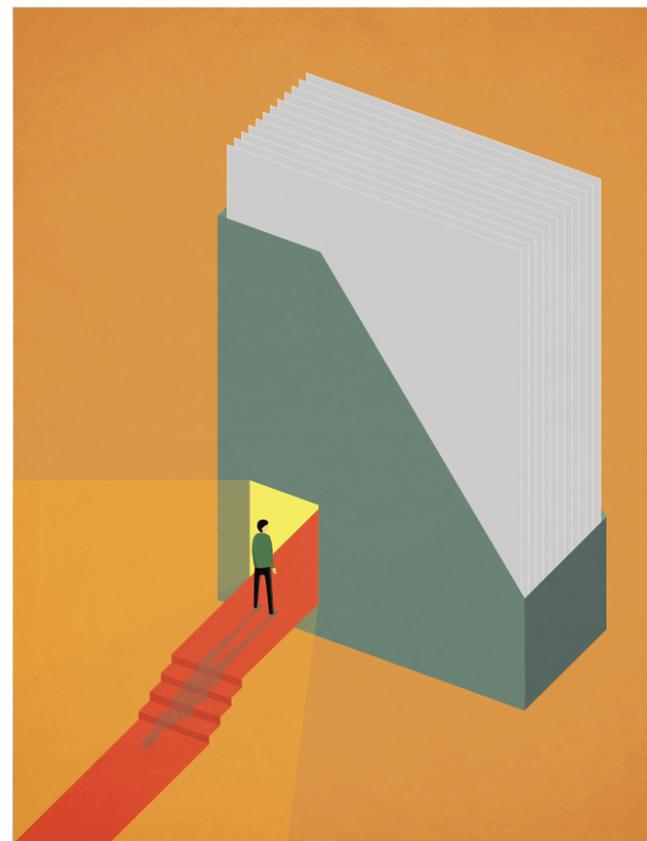
Dari kebijakan kenaikan PTKP, masyarakat perlu selalu diedukasi tentang peran pajak bagi masyarakat,

dimana pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk penerimaan negara, tetapi juga sebagai sistem untuk mengatur stabilitas perekonomian. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang baik bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulator*).

Selama ini fungsi penerimaan yang lebih banyak diketahui masyarakat, yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak dalam mengatur perlu banyak disosialisasikan, yaitu pajak digunakan sebagai cara atau alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi. Bagi pemerintah sendiri, fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan dengan seimbang agar tujuan pajak dapat dicapai untuk menghimpun penerimaan Negara maupun untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi.

Optimalkan Capaian Target, DJP Perkuat Basis Data Sekunder

Riviu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan



Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah senantiasa mengawasi kepatuhan pembayaran pajak. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah tidak hanya memanfaatkan data primer yang berasal dari laporan pajak, tetapi juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari institusi secara berkala. Data sekunder bermanfaat untuk memperkirakan potensi pajak dari suatu entitas dan wajib pajak orang pribadi. Data ini sekaligus menjadi alat untuk mendeteksi adanya kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Terlebih lagi, Indonesia menganut sistem *self assessment*, sehingga wajib pajak berkewajiban untuk menghitung dan

menyetor sendiri jumlah pajak yang dibayar. Konsekuensi yang muncul akibat pemberlakuan sistem ini adalah adanya risiko ketidakakuratan penghitungan pajak, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak.

Sebagai dasar hukum pengumpulan data dan informasi, pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Perumusan PMK ini mengacu pada ketentuan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Perubahan PMK

PMK Nomor 39/PMK.03/2016 yang merupakan perubahan kelima atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 memuat beberapa aturan perubahan mengenai data yang harus disampaikan institusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Diantaranya yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu, ketentuan dalam PMK ini juga menambah sebanyak enam institusi yang wajib menyampaikan data dan informasi secara berkala kepada DJP. Dengan demikian, saat ini terdapat 67 institusi yang terdiri dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang berkewajiban untuk menyampaikan sejumlah data dan informasi. Adapun keenam institusi tambahan tersebut adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), PT Taspen, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta 23 bank/lembaga penyelenggara kartu kredit.

Kewajiban Kemristek Dikti melaporkan data sertifikasi dosen setiap tahun, sedangkan DJKN wajib menyampaikan data pemenang lelang melalui *e-auction*, data balai lelang, dan data pejabat lelang kelas II. Selanjutnya, PT Taspen diwajibkan untuk menyampaikan data penerima pensiun dan data peserta aktif. Sementara BPOM diharuskan melaporkan database registrasi produk beserta perusahaan pemilik produk. Terakhir, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan

Sosial Kementerian Sosial diwajibkan untuk menyampaikan data izin undian gratis berhadiah beserta data pemenang undian.

Data Transaksi Kartu Kredit

Data lain yang wajib disampaikan kepada DJP adalah data transaksi nasabah dari 23 penyelenggara kartu kredit. Pelaporan data tersebut paling sedikit memuat nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID dan nama *merchant*, serta data pemilik kartu yang terdiri dari nama, alamat, nomor induk kependudukan atau paspor, dan NPWP.

Laporan dimaksud juga harus menyertakan data bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah, dan pagu kredit. Semua data dimaksud bersumber dari *billing statement*. Selanjutnya, bank/lembaga penyelenggara kartu kredit wajib menyampaikan data berkala setiap bulan dengan penyampaian pertama paling lambat pada 31 Mei 2016.

Sebanyak 23 bank/lembaga penyelenggara kartu kredit yang wajib menyampaikan data berkala setiap bulan yaitu Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Bukopin, Tbk., PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank CIMB Niaga, Tbk., PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Bank MNC Internasional, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank

Mega, Tbk., PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), Tbk., PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank OCBC NISP, Tbk., PT Bank Permata, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., PT Bank Sinarmas, PT Bank UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, The Hongkong & Shanghai Banking Corp., PT Bank QNB Indonesia, Citibank N.A., dan PT AEON Credit Services.

Penutup

Ketentuan terkait perubahan dan penambahan instansi yang wajib menyampaikan data secara berkala kepada DJP diharapkan dapat memberi lebih banyak tambahan data yang berguna sebagai data dukung dalam pemeriksaan pajak. Namun, ketentuan mengenai kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit membuat beberapa pihak mengaitkannya dengan aturan kerahasiaan bank dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya kebocoran data transaksi pajak kepada pihak yang tidak berkepentingan. Untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi secara masif khususnya kepada para pemegang kartu kredit bahwa pelaporan data penggunaan kartu kredit untuk kepentingan perpajakan tidak melanggar ketentuan yang ada. Hal ini bahkan sangat bermanfaat dalam penggalan potensi ekonomi, sekaligus sebagai basis data sekunder pajak.

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Teks Budi Sulistyono



Menjejak Hingga ke Perut Bumi

Bagi Adhi, bahagia itu sederhana. Saat ia bisa menyatu dengan alam dan menikmati setiap detik keindahannya.

sekolah di SMA 1 Salatiga. Saat itu Adhi menaruh minat pada hasil karya kelompok Karya Ilmiah Remaja. Ketertarikannya dengan Karya Ilmiah Remaja menjadi perhatian tersendiri oleh salah satu guru Bahasa Indonesia.

Sang guru akhirnya menyuruh Adhi mengikuti lomba menulis esai. Betapa senangnya Adhi saat terpilih menjadi pemenang lomba menulis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ia juga menjuarai lomba menulis yang diadakan Keduataan Besar Korea di Jakarta. Prestasi yang diraih Adhi di bangku SMA ini memicu semangatnya untuk terus menulis dan berkarya.

Tahun 2007 Adhi melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung Fakultas Ilmu

dan Teknologi Kebumihan. Pada waktu bersamaan, pria yang memiliki sertifikasi *scuba diving* level Open Water dari The National Association of Underwater Instructors ini juga mendaftar Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN). Sekitar lima minggu menjadi mahasiswa Kampus Ganesha, Adhi mendapat pengumuman bahwa ia diterima di STAN.

Dengan berbagai pertimbangan, Adhi memutuskan meninggalkan ITB dan memulai kehidupan perkuliahan di STAN hingga Oktober 2010. Tahun 2014 Adhi berkesempatan melanjutkan studi dengan mengambil program Diploma IV jurusan Akuntansi.

Terinspirasi "5 cm"

Saat kuliah, Adhi mengagumi novel "5 cm" karya Donny Dhingantoro. Novel ini menceritakan persahabatan lima anak muda yang mengalami titik balik kehidupan setelah mendaki gunung Semeru bersama. Terinspirasi dari karya tersebut, Adhi pun memutuskan mendaki gunung Semeru bersama sejumlah teman. Sepulang dari perjalanan, ia menuliskan pengalamannya secara berseri di fitur Notes di Facebook. Salah seorang teman dari komunitas pembaca novel "5 cm" menyukai tulisan Adhi lalu meneruskannya ke Donny Dhingantoro.

Tak disangka, sang pengarang novel pun menyukai gaya penuturan Adhi saat menceritakan pengalamannya mendaki gunung Semeru. Hingga akhirnya tulisan berseri tersebut ditayangkan kembali di blog pribadi Donny Dhingantoro. Betapa senangnya Adhi saat itu, tulisannya mendapat apresiasi langsung dari pengarang novel favoritnya. Bahkan pada saat proses pembuatan layar lebar "5 cm", Donny Dhingantoro sempat menghubungi Adhi untuk menanyakan kondisi terkini area gunung Semeru dan memintanya mengirimkan beberapa foto.

Perjalanan ke Semeru sungguh membuat Adhi ketagihan untuk mengeksplorasi tempat wisata baru. Terlebih tulisan perjalanannya mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Adhi tidak hanya bermimpi menjadi *traveler*, namun juga bercita-cita menjadi *travel writer*.

Menjelajah dunia tambang

Bagi Adhi, *traveling* tidak hanya menikmati keindahan gunung dan pantai. Hal yang terbaik yaitu saat bisa mengeksplorasi tempat baru di pelosok negeri. Pada tanggal 14-22 Februari 2016 lalu, Adhi berkesempatan mengunjungi lokasi penambangan Batu Hijau yang dioperasikan PT Newmont Nusa Tenggara. Adhi terpilih menjadi salah satu peserta pada acara berjudul Sustainable Mining Bootcamp yang diadakan PT Newmont Nusa Tenggara bekerja sama dengan Metro TV.

"Awalnya saya tahu infonya dari teman-teman di Twitter. Persyaratannya dengan mengirimkan esai bertema tambang dan lingkungan. Tulisan saya mengenai kontradiksi tambang dengan pelestarian lingkungan. Saat itu sedang ramai berita tragedi aktivis lingkungan Salim Kancil di Lumajang," jelasnya. Adhi pun menjadi salah satu peserta dari 20 finalis yang akan mengikuti kegiatan edukasi pertambangan selama 9 hari di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Seusai program *bootcamp* di Sumbawa Barat, peserta diminta memberikan *output* berupa tulisan. Berkat tulisan Adhi yang meraih Juara III, ia berhak mengikuti program *bootcamp* selanjutnya di PT Newmont Minahasa Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara bulan Maret lalu. Ke depan, seluruh tulisan peserta *bootcamp* akan dikompilasi menjadi buku.

Adhi mengakui, *traveling* bukanlah sebuah hobi. Pergi menjelajah ke suatu tempat baru merupakan kebutuhan jiwa. Pria yang mengagumi fotografer dan wartawan senior Don Hasman ini bercita-cita kelak bisa menerbitkan buku tentang keindahan Indonesia. "Saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak hanya jalan-jalan, tapi juga turut menjaga kearifan lokal dan kebersihan lokasi setempat," ujarnya.

Tiga minggu berkelana

Setiap perjalanan akan memberikan kesan tersendiri. Bagi Adhi, yang tak akan terlupakan adalah saat ia melakukan perjalanan dari Pulau Flores menuju Pulau Bali selama tiga minggu. Titik awal perjalanan adalah Danau Kelimutu di Pulau Flores. Berbagai destinasi menarik di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat telah ia sambangi. Mulai dari rumah pengasingan Presiden Pertama RI Soekarno di Ende, menjelajah Pulau Riung, mendaki Gunung Tambora, mengunjungi desa Wae Rebo dan desa adat Bena, menjelajah Pulau Komodo hingga Pulau Lombok dan Pulau Bali. Begitu banyak suka duka yang ia alami bersama teman seperjalanannya. Sungguh tiga minggu yang tak akan terlupakan seumur hidup.

No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old, familiar pillow. Petikan kalimat dari Lin Yutang itu tak pernah lepas dari benak pria pengagum Bung Hatta dan B.J Habiebie ini. "Saya merasakan sekali saat tiga minggu di Flores, ada suatu titik dimana kita merindukan rumah," ujarnya sembari tersenyum. Adhi akan terus menjejak hingga pelosok negeri, menikmati keindahan Sang Pencipta. Kisah-kisah yang menggugah dapat diakses melalui blog pribadinya www.adhikurniawan.com.

Teks Pradany Hayyu

Foto Dok. Pribadi



Puncak Semeru memang magis. Selalu membuat jatuh cinta siapapun yang mendatanginya. Hal serupa dialami Adhi Kurniawan. Ia menghabiskan liburan semester perkuliahan dengan mengunjungi puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Suatu perjalanan yang menjadi titik tolaknya untuk mengenal surga tersembunyi negeri ini. Suatu awal yang mengantarnya ke berbagai tempat penuh pesona lainnya.

Adhi, sapaan akrabnya, lahir di Ambarawa, 27 Januari 1989. Pelaksana Bagian Umum dan Kehumasan Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ini menghabiskan masa kecil di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian, ia melanjutkan

Menjawab Dilema Ibu Bekerja



Foto
Dok. Biro KLI

Setiap 21 April, wacana kesetaraan gender ramai diperbincangkan di media. Lini media sosial turut gaduh dengan isu feminisme yang dibenturkan dengan peran sosial perempuan sebagai penyangga keluarga. Beberapa tahun belakangan, perlu tidaknya ibu kembali ke rumah untuk fokus mengasuh anak menjadi topik kontroversial dan memicu polarisasi opini.

Kebimbangan ibu bekerja semakin menjadi saat dihadapkan pada keinginan untuk memberikan ASI eksklusif, keinginan untuk berada di samping anak pada masa pertumbuhan, dan kesulitan dalam memperoleh pengasuh yang dapat dipercaya. Akibatnya, sebagian ibu bekerja diam-diam menyimpan hasrat untuk meninggalkan karier atau pengabdianya kepada negara agar bisa menghabiskan waktu lebih bersama anak dan keluarga.

Menilik ke belakang, gamangnya para ibu bekerja mulai mewabah semenjak adanya dorongan kuat untuk mengembalikan nilai moral dan karakter bangsa ke dalam diri anak-anak sebagai generasi berikutnya. Berbagai tindak kekerasan pada anak hingga pengaruh pergaulan buruk pada anak di luar pengawasan orang tua menjadi sumber kekhawatiran para ibu. Sementara itu, tuntutan untuk mencetak anak dengan kualitas paripurna juga semakin tinggi. Sebab melalui anak-anak tersebut, bersemayam harapan akan lahirnya bangsa yang kuat, santun, dan berdirikari.

Kehadiran perempuan di ruang publik bukanlah suatu hal yang dicapai secara instan. Ada pergerakan berumur ratusan tahun di baliknya. Ada Kartini-kartini yang mendobrak batasan zaman guna menunjukkan pentingnya keterlibatan perempuan pada urusan yang terkait hajat hidup masyarakat luas.

Terlepas dari pilihan yang diambil, keterlibatan perempuan di ruang publik tidak dapat dihindari. Selain untuk menyokong finansial keluarga dan kebutuhan akan aktualisasi diri, perempuan sesungguhnya memiliki kontribusi vital bagi pembangunan bangsa. Kita butuh perempuan di berbagai sektor, mulai dari dokter, guru, perawat, ekonom, ilmuwan, hingga aparatur sipil negara. Perempuan mempunyai kelebihan khusus yang membuatnya lebih andal dalam situasi tertentu. Tidak hanya sebatas memberi warna, kehadiran unsur feminine menjadikan sebuah lingkungan pekerjaan lebih luwes terhadap perubahan dan peka terhadap humanisme.

Menyadari kontribusi ibu dalam masyarakat, maka sudah selayaknya wacana pengarusutamaan gender betul-betul dikaji dan diterapkan. *Support system* yang mendukung bagi para ibu bekerja perlu dibangun termasuk kebijakan yang mengakomodasi hal tersebut. Dengan demikian, kecemasan para ibu dapat diminimalkan dan kontribusinya bagi masyarakat luas dapat secara optimal dijalankan.

Teks Citra Handayani



Judul: Mengawal Reformasi Pembangunan Ekonomi
Pengarang: Makmun Syadullah
Penerbit: IPB Press
Kota Terbit: Bogor
Tahun Terbit: Oktober 2015
ISBN: 9789794939031

Dengan pendekatan yang sangat interdisipliner, buku berjudul "Mengawal Reformasi Pembangunan Ekonomi" karya Makmun Syadullah ini mengurai secara mendalam mengenai interaksi ekonomi dan politik. Ditambah dengan relevansinya dengan kondisi saat ini di Indonesia, buku ini menjadi referensi penting baik bagi pemerintah maupun publik untuk mengawal reformasi ekonomi ke depannya.

Sebagaimana menjadi latar belakang utama penulisan buku ini, penyebab di balik rendahnya *tax ratio* di Indonesia menjadi sebuah pertanyaan besar. Menurut Makmun, hal ini dibagi menjadi tiga faktor utama yang masing-masing dijelaskan dengan sangat mendalam di buku ini. Dari sisi ekonomi, digarisbawahi oleh Makmun bahwa kebijakan perpajakan sering mengakibatkan distorsi pada perekonomian yang berakar dari *mismatch* antara tujuan Pemerintah untuk redistribusi pendapatan dan preferensi masyarakat untuk melakukannya. Sementara dari sisi tata kelola (*good governance*), penekanannya yaitu pada simplifikasi dan efisiensi sistem perpajakan.

Dari sisi politik, Makmun menguraikan demokrasi seperti apa yang bisa pro maupun kontra produktif terhadap

pencapaian ekonomi suatu negara. Banyak fakta menarik dalam kaitannya dengan hubungan dua indikator ini, misalnya *stylised fact* bahwa negara-negara yang cenderung otoriter seperti Tiongkok dan Singapura justru menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Adanya inkonklusivitas dari fakta ini mendorong dilakukannya riset lebih dalam melalui pengembangan indikator demokrasi dengan *proxy* yang lebih luas. Kesimpulannya, transparansi pemerintahan lah yang menjadi kunci.

Selain faktor-faktor yang berkaitan dengan *good governance* sebagaimana dijelaskan di atas, buku ini mengungkap suatu fakta yang menarik bahwa negara yang paling korup di dunia justru adalah negara yang dipersepsikan paling religius. Selain itu, pentingnya menghidupkan jalur penerimaan negara di luar pajak juga merupakan bagian yang sangat penting bagi referensi para pembuat kebijakan di Indonesia. Antara lain dengan menghidupkan jalur penerimaan negara melalui mobilisasi tabungan jangka panjang.

Meskipun perekonomian yang menjadi fokus dari buku ini lebih mengarah kepada pendekatan volume, Makmun menambahkan penjelasan mengenai pentingnya melihat pencapaian ekonomi dari sisi lain selain besaran pertumbuhan ekonomi itu sendiri, yaitu dari sisi kualitasnya.

Peresensi Adelia Pratiwi, Badan Kebijakan Fiskal

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Perpustakaan Kemerkeu

Perpustakaan Kementerian Keuangan

@kemenkeuilib

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 **Mohammad Hatta: Untuk Negeriku** Kompas Media Nusantara
- 2 **Rahasia Ayah Edy Memetakan Potensi Unggul Anak** Ayah Edy
- 3 **Bertanam Hidroponik Untuk Pemula** Puput Alviani
- 4 **This is Africa!: Catatan Perjalanan dari Benua Hitam** J. Erickson
- 5 **Dari Puncak Andalusia** Tariq Suwaidan

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 **Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan** Nusron Wahid
- 2 **Credit Union Optimize People** Munalidus
- 3 **How to Win Friends & Influence People in The Digital Age** Dale Carnegie
- 4 **Hukum Organisasi Internasional United Nations Law** Suryokusumo S.
- 5 **Fasilitas Kepabeanaan** Surono

Satu Hari Seru di Dusun Bambu

Bandung masih menjadi surga wisata bagi para pemburu hiburan terutama di akhir pekan. Sejuk udara dan nikmat kulineranya, serta ragam tempat menarik membuatnya menjadi salah satu tujuan rekreasi. Bagi yang ingin bersantai dengan keluarga, Dusun Bambu yang terletak di kawasan Lembang ini boleh jadi memberikan pengalaman seru yang berbeda. Tempat ini menyatukan konsep wisata alam, pelestarian budaya sunda, dan kebersamaan keluarga.

Sejak memasuki gerbang pertama, terdapat beberapa dekorasi berbahan bambu yang menarik perhatian. Sesuai namanya, taman rekreasi keluarga ini memang merupakan kawasan ekowisata yang menjadi tempat konservasi bambu. Sebelumnya, kawasan di bawah kaki Gunung Burangrang ini merupakan lahan yang rusak dan terabaikan. Niat sang pemilik untuk merehabilitasi lahan ini memerlukan waktu tak kurang dari tiga tahun dengan melakukan penanaman sekitar 100 ribu pohon.

Setelah membeli tiket seharga Rp15.000, pengunjung akan diantarkan masuk oleh mobil kawasan yang berwarna-warni. Baru sampai sini saja, anak-anak sudah merasa senang. Tak jauh

berjalan kaki dari tempat menurunkan penumpang, area pertama yang akan pengunjung dapati adalah bangunan besar serupa Pujasera yang berisikan berbagai kios penjual makanan.

Persis di bawahnya, pengunjung bisa melihat kawasan bermain anak dengan bentuk yang lucu dan menggemaskan. Kawasan itu terbagi menjadi dua area yaitu *rabbit hole* (liang kelinci) dan *bamboo playground* (taman bermain bambu). Masing-masing area ini mengharuskan pembelian tiket yang terpisah. Area *rabbit hole* diisi oleh labirin rumput sintesis dan kandang kelinci dengan bentuk seperti rumah kurcaci. Sementara area *bamboo playground* diisi oleh berbagai mainan seperti perosotan, sepeda, titian keseimbangan, trampolin, dan mainan lainnya. Dijamin, anak-anak bisa melompat, memanjat, dan bermain sampai lupa waktu.

Sambil menunggu anak-anak bermain, pengunjung dapat menikmati santapan di Pujasera atau rumah makan tepi danau yang menyajikan makanan Sunda. Jika dianggap sudah terlalu biasa, pengunjung bisa memilih tempat makan unik yang dinamakan Lutung Kasarung. Dengan menyusuri jembatan kayu yang kokoh setinggi dua meter dari atas tanah,

pengunjung bisa mendapati tempat makan yang berbentuk mirip kereta gantung berbalut ranting pohon yang lebat. Sekilas, tampak seperti sarang burung atau sarang lebah raksasa yang menggantung di dahan pohon. Sentuhan desain arsitektur yang unik di lahan seluas lima belas hektar ini memang sangat memanjakan mata. Konsepnya dipersiapkan dengan matang dan berseni.

Tak hanya itu, pengenalan budaya sunda juga dihadirkan melalui berbagai kreasi dari bambu yang dijual di Pasar Khatulistiwa –di tengah area Pujasera. Mulai dari mainan anak-anak, wayang, angklung, boneka, hingga pajangan unik. Berbagai makanan khas Provinsi Jawa Barat juga tersedia di pasar ini, siap dibawa pulang sebagai oleh-oleh.

Usai lelah bermain dan menyantap makanan lezat, pengunjung dapat berjalan sedikit ke atas untuk bermain air di sungai kecil yang disebut Tegal Pangulinan. Anak-anak yang kelelahan pasti akan kembali bersemangat. Jika pengunjung ingin bermalam, Dusun Bambu juga menyiapkan area penginapan yang berbentuk vila tradisional (Kampung Layung) atau penginapan berkonsep kemah di alam terbuka (Sayang Heulang). Menarik sekali untuk dicoba!

Teks Resirasari Diah,
Pegawai Sekretariat Jenderal

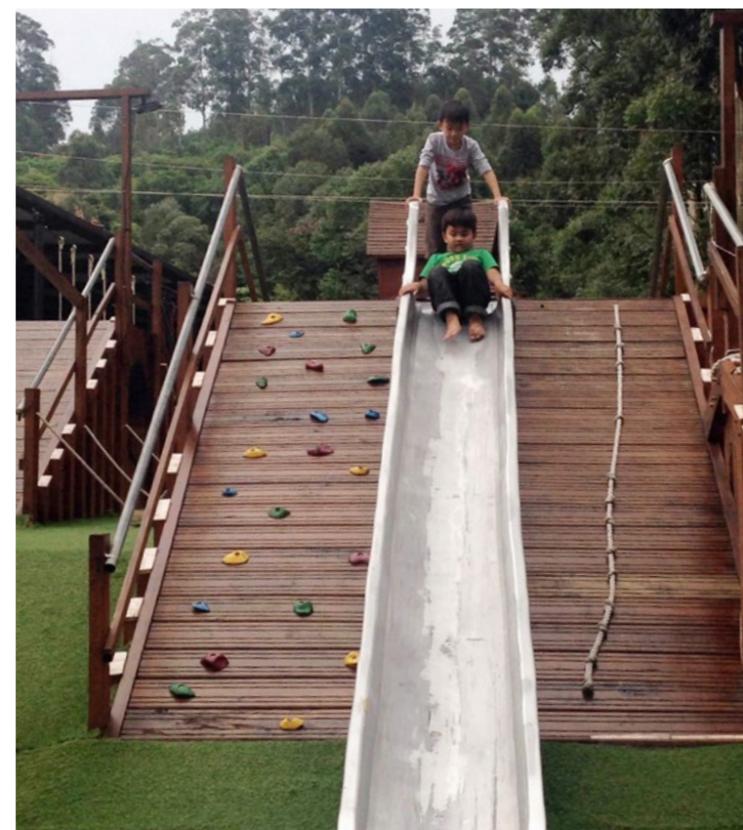


Foto
Resirasari Diah

Rumah Kedua Bagi Valerina

Bagi Presenter Berita Valerina Daniel, pendidikan adalah salah satu hal yang paling utama. Peraih beasiswa Australian Leadership Awards (ALA) di Monash University tahun 2009-2010 itu mendorong anak-anak muda untuk menggapai impian memperoleh beasiswa dengan pantang menyerah. “Kalau belum diterima pada percobaan pertama, coba lagi,” kata Valerina saat mengisi sebuah acara komunitas di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, akhir bulan lalu.

Valerina lulus dari Monash University pada tahun 2010 dengan gelar Master in Communication and Media

Studies. Pada tahun 2012, Runner Up Putri Indonesia 2005 itu mengikuti sang suami yang mendapatkan penugasan pekerjaan di Amerika Serikat. Di Washington DC, Valerina dan keluarga kecilnya tinggal selama kurang lebih tiga tahun. Pada tahun 2015, Valerina kembali ke tanah air dan melanjutkan kariernya sebagai pembawa acara program berita.

Menurut Valerina, menempuh studi di Negeri Kangguru merupakan salah satu pengalaman terbaik dalam hidupnya. Apalagi pada tempo yang tidak terlalu jauh, suaminya juga mendapatkan beasiswa studi dari Pemerintah Australia. Selain berkesempatan memperdalam ilmu komunikasi yang menjadi salah satu *passion*-nya, Valerina juga diberikan kemudahan saat mengajukan cuti kuliah satu semester karena hamil. “Pemerintah Australia sangat *supportif*,” ujarnya.

Australia menjadi negeri pilihan Valerina melanjutkan pendidikan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, ada banyak tokoh publik di tanah air yang merupakan lulusan universitas di sana, misalnya Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. “Pak Boediono (Mantan Wakil Presiden) juga merupakan alumni Monash University,” kata Valerina. Di samping itu, Australia menempati peringkat kesembilan di dunia untuk *University System Ranking*. “Peringkatnya di atas Jerman, New Zealand, dan Jepang,” ujarnya lagi.

Sebagai sebuah negara donor, jumlah beasiswa yang diberikan Pemerintah Australia tergolong besar, yaitu lebih dari 200 juta dolar Australia untuk kategori beasiswa internasional. Tak mengherankan, ada 5 dari 30 kota tujuan belajar dunia di sana. Bagi Penerima Australian Alumni Awards for Media and Journalism 2011 itu, Australia sudah terasa seperti rumah kedua. “Masyarakatnya terbuka dan ramah terhadap orang asing. Pemandangannya juga indah,” kata Valerina.

Kini, selain menjadi pembawa acara, Valerina juga disibukkan dengan aktivitas sebagai Duta Lingkungan Hidup. Predikat itu sebenarnya sudah disandang Valerina sejak sebelas tahun silam. Sebagai duta, Valerina telah banyak mendapatkan kesempatan hadir dan berbicara dalam berbagai forum di dalam dan luar negeri. Di samping itu, dia juga dapat bertemu dengan sejumlah tokoh penting, seperti Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore, dan Aktor Hollywood yang juga aktivis lingkungan Harrison Ford.

Di sela-sela kesibukannya, Valerina tengah menantikan peluncuran buku anak terbarunya berjudul *Kisah 4 Sahabat Super*. Sebelumnya, Valerina telah menulis buku berjudul *Easy Green Living* dan sepuluh seri cerita anak *Aku Sayang Bumi*.

Teks Dwinanda Ardhi



Foto Andi Abdurrochim

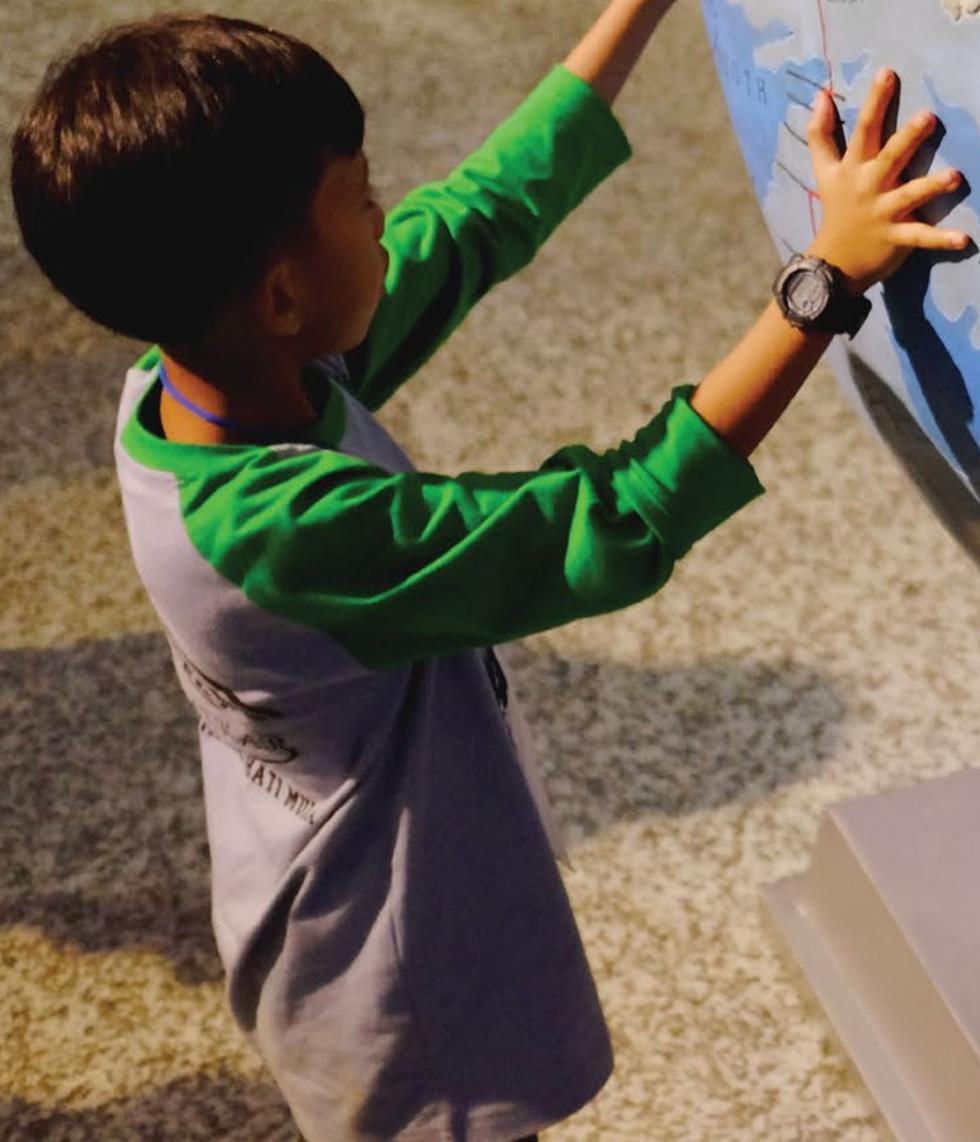


Bung Piskal

CERITA: ARFINDO GAMBAR: BIMD



MEMPERINGATI
HARI PENDIDIKAN NASIONAL



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA